



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**

MPR / DPR - RI, Gd. Nusantara I, Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Telp. (021) 575 6087 - 575 6088 - 575 6090, Fax. (021) 575 6086 Website : www.fraksi.pks.id



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
KETERANGAN PEMERINTAH ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)
TAHUN ANGGARAN 2023 BESERTA NOTA KEUANGAN**

Disampaikan Oleh : H. Sukamta, Ph.D.
Nomor Anggota : A-445

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pimpinan dan Anggota DPR RI, Saudara Menteri beserta jajaran, serta hadirin yang kami hormati.

Pertama-tama, perkenankan kami mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan semesta alam, pemilik kekuasaan yang ada di langit dan di bumi. Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah, yang telah memberikan anugerah kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Kita bersyukur bersama seluruh rakyat Indonesia di seluruh penjuru tanah air, dapat memperingati dan merayakan 77 tahun Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tengah ketidak pastian global, krisis energi dan pangan, gangguan rantai pasok pangan, harga-harga komoditas global yang bergejolak, tantangan geopolitik di Laut Cina Selatan dan belahan dunia lainnya, serta pandemi Covid-19 yang sampai kini statusnya belum dicabut. Fraksi PKS sangat optimis dan percaya dengan semangat Kemerdekaan RI bahwa kita semua dapat keluar dari krisis ini dan menjadi

juara dalam menghadapi tantangan tersebut selama kita bersatu, saling tolong menolong, bantu membantu, dan bahu-membahu sebagai kesatuan anak bangsa.

Melalui Pidato Kenegaraan dan Keterangan Pemerintah Atas RUU Tentang APBN Tahun 2023 beserta Nota Keuangan yang telah disampaikan oleh Presiden, maka dapat memberikan pemahaman bagaimana capaian-capaian dan tantangan yang telah kita hadapi sebagai satu kesatuan perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Memasuki usia 77 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dan delapan tahun Pemerintahan Presiden Jokowi kita masih diliputi oleh persoalan-persoalan ekonomi yang fundamental. Pada usia 77 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia mari kita bersama-sama merenung dan mengingat kembali apa yang menjadi tujuan dari bernegara. Selama 77 tahun apa yang telah kita sumbangsihkan untuk negara tercinta ini. Apa capaian dan prestasi yang telah kita torehkan selama memimpin. Usia 77 tahun bukanlah usia yang muda, setidaknya, 23 tahun lagi kita akan menginjak usia satu abad. Apa yang akan kita wariskan kepada generasi penerus bangsa kedepan. Tentu kita ingin agar republik ini panjang umur berterusan sehingga kita wajib mewariskan hal-hal yang baik kepada anak dan cucu kita. Kita semua juga tidak ingin dianggap beban oleh generasi penerus di kemudian hari karena salah kebijakan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sehingga, APBN 2023 yang akan kita bahas nanti harus mengarah dan sampai kepada tujuan-tujuan tersebut. APBN 2023 kita harus dapat menstimulus dan berkontribusi optimal serta signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.

Hadirin yang Kami Hormati,

Fraksi PKS memandang secara umum bahwa RAPBN tahun 2023 yang diajukan masih menunjukkan tidak ada yang istimewa dari target Pemerintah dalam menunaikan janji-janji ekonominya. RAPBN tahun 2023 membutuhkan penajaman agar lebih sehat, kredibel dan lebih pro-rakyat di masa ketidak pastian global ini, serta berdampak lebih optimal bagi kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 Ayat 1. Fraksi PKS juga mengingatkan bahwa APBN 2023 adalah APBN yang harus kembali kepada kondisi target defisit di bawah 3 persen dari PDB sebagaimana amanah Penjelasan Pasal 12 ayat 3 Undang Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Selanjutnya Fraksi PKS akan menyampaikan catatan-catatan secara khusus sebagai berikut:

Asumsi Makro Ekonomi

1. Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk mencapai target-target asumsi makroekonomi 2023, sebagai perwujudan komitmen pemerintah kepada rakyat. Kegagalan kembali mencapai target-target tersebut mencerminkan bagaimana kualitas penyelenggara negara yang pada akhirnya memengaruhi pencapaian target ekonomi, sosial, dan kesejahteraan. Hal tersebut sekaligus menentukan bagaimana Indonesia bisa keluar dari berbagai persoalan. Dalam jangka pendek, persoalan yang dimaksud adalah kemampuan pemerintah memacu ekonomi segera pulih dari pandemi Covid-19. Pada jangka panjang, persoalan yang harus dituntaskan adalah bagaimana Indonesia bisa keluar dari *middle income trap*. Tentu, kegagalan mencapai target-target makroekonomi, khususnya pertumbuhan, menjebak ekonomi pada pendapatan menengah bahkan bisa turun ke level pendapatan *lower*.
2. Fraksi PKS menilai upaya Indonesia keluar dari *middle income trap* semakin berat. Target pertumbuhan dan realisasinya yang rendah menjadi tantangan utama. Diperlukan pertumbuhan ekonomi minimal 6 persen per tahun agar

Indonesia lulus dari *middle income trap*. Sementara itu, realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2015-2021 belum pernah mencapai 5,5 persen. Sulit bagi Indonesia untuk keluar dari *middle income trap* jika tidak melakukan transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi tersebut mencakup sumberdaya manusia hingga komposisi ekonomi domestik. Perlu upaya keras agar sumberdaya manusia meningkat. Alokasi APBN sudah 20 persen untuk belanja pendidikan tetapi kualitas sumberdaya manusia belum juga meningkat. Indonesia harus memacu ekonomi yang bernilai tambah tinggi lewat *export and investment economic driven* sehingga tidak lagi bergantung pada ekonomi komoditas. Selain itu, pemerintah harus mendorong ekonomi hijau agar aktivitas tidak bergerak dalam pola *business as usual*. Ketika ekonomi Indonesia bekerja pada pola tersebut maka pertumbuhan bergerak pada kisaran 4 persen sehingga gagal keluar dari *middle income trap*.

3. Fraksi PKS menilai pemerintah pesimis terhadap kondisi ekonomi tahun 2023 karena target pertumbuhan yang ditetapkan hanya 5,3 persen dari interval 5,3-5,9 persen kesepakatan awal. Ini menjadi gambaran yang kurang baik dari pemerintah dalam memberikan sinyal positif bagi sektor swasta. Padahal, potensi Indonesia untuk bisa tumbuh tinggi pada 2023 cukup terbuka, dengan memaksimalkan kontribusi ekonomi domestik. Pemerintah telah menyebutkan bahwa laju pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat menjadi determinan penting dalam akselerasi transformasi ekonomi tahun depan.
4. Fraksi PKS menilai rendahnya target pertumbuhan ekonomi 2023 berdampak signifikan terhadap target di sektor lainnya khususnya perpajakan. Hal lain yang perlu ditekankan adalah target yang berada di margin terendah jangan sampai kembali gagal dicapai. Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang paling tinggi dicapai pemerintah hanya 5,17 persen pada 2018. Dalam berbagai kesempatan, pemerintah menarasikan gejolak ekonomi global sebagai biang masalah kegagalan mencapai target-target ekonomi dan sosial. Padahal, Indonesia merupakan *small open economy* yang integrasi ekonomi terhadap

ekonomi global terbatas. Tahun depan, RPJMN sudah berakhir tetapi berbagai target dikhawatirkan tidak tercapai.

5. Di tengah-tengah target pertumbuhan ekonomi yang rendah, Fraksi PKS mengkhawatirkan kegagalan mencapai target tersebut. Hingga saat ini, ekonomi domestik dan global dalam ketidakpastian tinggi. Perekonomian domestik dihadapkan pada masalah lonjakan inflasi dan belum berakhirnya dampak pandemi Covid-19. Sementara itu, ekonomi global ditantang oleh konflik Rusia-Ukraina, kenaikan the Fed fund rate, hingga stagflasi global. Selain beberapa hal tersebut, muncul ancaman krisis utang karena tingginya biaya pinjaman (yield) dan derasnya capital outflow dari negara berkembang. Moderasi pertumbuhan ekonomi global diprediksi menurunkan harga komoditas yang pada akhirnya memengaruhi fiskal pemerintah. Pemerintah pun harus patuh pada pencapaian defisit 3 persen dari PDB sehingga pergerakannya semakin menyempit. Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk lebih kreatif dalam mencari sumber-sumber pertumbuhan baru sehingga target dapat dicapai.
6. Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi sehingga mampu mencapai pertumbuhan inklusif. Selama ini, pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh kelas menengah-atas sedangkan kelas bawah terus berjerat dalam kemiskinan. Dampak krisis pandemi Covid-19 sangat dalam bagi kelas bawah karena mereka kehilangan pekerjaan sehingga tidak menghasilkan pendapatan. Situasi tersebut semakin berat karena kenaikan inflasi yang terus terjadi. Sementara itu, kelas atas diuntungkan oleh kenaikan harga komoditas dunia. Sektor UMKM, yang merupakan tempat bekerja rakyat miskin belum mampu bangkit dari keterpurukan sebagai dampak pandemi Covid-19. Fraksi PKS juga melihat bahwa pemerintah belum memberikan fokus yang mencukupi terhadap UMKM. Sektor tersebut hanya sebagai jargon keberpihakan pemerintah pada ekonomi menengah ke bawah. Belum terlihat terobosan penting pada sektor UMKM.

7. Fraksi PKS menilai target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen sulit dicapai jika pertumbuhan konsumsi rumah tangga rendah. Fraksi PKS menilai ekonomi rumah tangga belum pulih dari dampak pandemi covid-19 sehingga konsumsi relatif rendah. Implikasinya, kontribusi sektor konsumsi rumah tangga terhadap PDB bisa menurun. Sementara peranan komponen lain dalam struktur PDB belum juga naik. Indikator yang menunjukkan belum pulihnya sektor rumah tangga adalah tingginya pengangguran mencapai 8,4 juta. Tenaga kerja nasional didominasi oleh sektor informal sehingga peranannya terhadap pembentukan output rendah. Di tengah-tengah peranan konsumsi rumah tangga yang melemah, muncul dorongan untuk mengubah struktur ekonomi ke arah yang lebih produktif. Dominasi konsumsi rumah tangga tidak bisa lagi menjadi penopang ekonomi Indonesia tetapi harus lebih ke kegiatan produktif. Untuk itu, perlu upaya memacu investasi yang lebih besar.
8. Fraksi PKS menilai bahwa pemerintah terlalu bangga bahkan terlena dengan julukan Indonesia sebagai bagian negara pemilik PDB terbesar di dunia. Padahal, ukuran tersebut hanya karena jumlah penduduk besar bukan karena output yang tinggi. Pendapatan per kapita bisa menjadi ukuran yang penting untuk melihat bagaimana tingkat kesejahteraan suatu negara. Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara kawasan bahkan jika dibandingkan dengan kelompok G-20, Indonesia berada di urutan terbawah. Karena itu, pemerintah harus fokus pada perbaikan modal dasar pembangunan seperti penduduk. Penduduk besar yang kurang berkualitas tentu akan menjadi beban pembangunan dan menggerogoti fiskal. Bercermin dari negara lain, hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah untuk memacu pertumbuhan yang lebih berkualitas adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan tabungan dan memacu adopsi teknologi di berbagai sektor.
9. Fraksi PKS menilai bahwa peranan konsumsi pemerintah sebagai countercyclical belumlah maksimal. Hal itu terlihat dari rendahnya kontribusi sektor tersebut terhadap PDB; di bawah 10 persen. Dalam dua triwulan tahun 2022, konsumsi

pemerintah tumbuh negatif masing-masing 7,59 persen (yoy) dan 5,24 persen (yoy). Pemerintah perlu mengidentifikasi alokasi anggaran dan realisasinya sehingga mengurangi terjadinya potensi *over-spending*, *mis-spending*, *under-spending* dan *fraud-spending*. *Over-spending* terjadi ketika belanja melebihi kebutuhan sedangkan *miss-spending* karena belanja yang tidak sesuai kebutuhan. *Under-spending* terjadi ketika belanja tidak terlaksana. Sementara *fraud-spending* karena belanja yang melanggar hukum (korupsi). Pada kategori *over*, *miss* dan *under*, persoalan muncul karena ketidakpahaman aparaturnya penyenggara sedangkan *fraud* lebih kepada penyelewengan belanja.

10. Fraksi PKS menilai ekonomi Indonesia sulit mencapai target pertumbuhan yang ditetapkan. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah masih rendahnya realisasi investasi karena tingginya ICOR. Rasio tersebut mencerminkan seberapa besar tambahan investasi yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan output. ICOR yang tinggi menggambarkan efisiensi investasi yang rendah di suatu negara atau ekonomi berbiaya tinggi. Jika pun investasi sudah banyak tetapi hasilnya sedikit. Beberapa penyebab ICOR tinggi di Indonesia adalah kualitas sumberdaya manusia rendah yang tercermin dari tingkat pendidikan (mayoritas tenaga kerja berpendidikan SMP ke bawah) dan skill terbatas. Faktor lain yang memengaruhi ICOR seperti suku bunga tinggi, lahan mahal dan tidak pasti, regulasi timpang tindih yang menyebabkan munculnya biaya tambahan bagi investor, logistik buruk dan inflasi tinggi.
11. Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan ekspor Indonesia sehingga kontribusinya terhadap pertumbuhan meningkat. Sampai saat ini, peranan ekspor terhadap pembentukan output rendah sehingga Indonesia tidak mampu memaksimalkan manfaat perdagangan internasional. Justru, Indonesia cenderung menjadi pasar impor. Beberapa persoalan klasik ekspor yang harus diselesaikan adalah: (i) ekspor didominasi komoditas mentah. Hal ini berbahaya karena kecenderungan ekonomi global menggunakan sumber energi bersih; (ii) kenaikan nilai ekspor karena kenaikan harga bukan karena nilai

tambah; (iii) peranan perwakilan dagang di luar negeri harus dimaksimalkan sehingga pasar-pasar baru terbuka; (iv) perlu memberikan insentif bagi perusahaan berorientasi ekspor; (v) dukungan pembiayaan ekspor; (vi) menjaga stabilitas mata uang; dan (vii) mahal biaya logistik.

12. Fraksi PKS kembali mendesak pemerintah untuk mempercepat hilirisasi. Indonesia merupakan negara produsen utama komoditas mentah dunia sehingga dapat memaksimalkan kontribusinya lewat hilirisasi. Selain itu, hilirisasi penting bagi industri dalam negeri yang dapat digunakan sebagai bahan baku sehingga impor dapat ditekan. Dari sisi energi, Hilirisasi juga penting untuk mengurangi impor energi. Impor energi menjadi penyebab menurunnya neraca perdagangan Indonesia. Pada bagian lain, hilirisasi dijadikan sebagai langkah Indonesia untuk mengurangi ekspor komoditas mentah.
13. Fraksi PKS menilai kebergantungan impor Indonesia semakin tinggi. Hal ini sangat berbahaya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tahun 2021, impor barang konsumsi naik 37 persen sedangkan impor bahan baku/penolong naik 42 persen. Sementara itu impor barang modal naik 20 persen. Impor buah-buahan pada 2021 mencapai US\$1,47 miliar naik 18 persen (yoy) sedangkan impor sayur-sayuran mencapai US\$939 juta naik 14,6 persen (yoy). Fraksi PKS menilai bahwa pembiaran impor akan menyebabkan sektor pertanian dan industri dalam negeri tertekan. Dampak lanjutannya adalah ketahanan pangan terancam. Selain itu, pengangguran meningkat karena sektor industri terpuruk.
14. Fraksi PKS menilai target inflasi 3,3 persen terlalu tinggi. Pemerintah seharusnya dapat menetapkan inflasi lebih rendah untuk memperbaiki daya beli masyarakat. Inflasi telah meningkat sejak akhir tahun lalu karena persoalan di dalam negeri maupun gejolak global. Oleh karena itu, inflasi tahun 2023 harus dapat ditekan lebih rendah ke kisaran 2 persen. Tahun 2021, realisasi inflasi hanya 1,9 persen. Salah satu agenda terbesar yang harus dilakukan pemerintah untuk menekan

inflasi adalah menjaga ketersediaan pasokan bahan-bahan pokok. Dengan demikian harga terjaga. Indonesia dihadapkan dengan kenyataan pahit bahwa sebagai negara agraris justru bahan-bahan makanan menjadi penyumbang inflasi terbesar. Kasus minyak goreng harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah sehingga tidak terjadi lagi.

15. Fraksi PKS mendesak pemerintah dan Bank Indonesia untuk fokus mengendalikan inflasi daerah. Beberapa sumber inflasi di daerah adalah ketersediaan bahan makanan, distribusi hingga masalah energi. Ketika inflasi daerah dapat ditekan maka inflasi nasional bisa lebih rendah. Fraksi PKS juga menilai bahwa stabilitas inflasi di daerah sangat krusial agar persoalan-persoalan sosial lainnya dapat diperbaiki seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan. Sebagaimana diketahui sebagian besar pendapatan rakyat kecil digunakan untuk membeli bahan-bahan pangan. Ketika harga bahan pokok naik maka mereka langsung miskin. Apalagi saat ini rakyat kecil banyak yang belum bekerja karena dampak pandemi covid-19.
16. Fraksi PKS menilai bahwa kegagalan pemerintah menekan inflasi berdampak buruk terhadap perekonomian. Dampaknya bukan saja bagi daya beli masyarakat dan sektor konsumsi tetapi juga sektor keuangan. Inflasi tinggi menyebabkan suku bunga sulit turun. Dengan demikian, realisasi kredit dan investasi terbatas. Pada fase pemulihan ekonomi seperti saat ini, kebutuhan pembiayaan sangat besar. Pada sisi lain, inflasi tinggi memaksa pemerintah untuk menaikkan yield SBN agar penyerapan lelang lebih tinggi. Yield SBN yang lebih tinggi menyebabkan beban fiskal yang semakin besar. Hal tersebut kemudian menumpuk utang dan menggerogoti APBN lewat anggaran pembayaran bunga dan pokok utang.
17. Fraksi PKS berpandangan bahwa nilai tukar sebesar Rp14.750 per US\$ terlalu lemah. Tahun lalu, realisasi nilai tukar Rupiah terhadap US\$ mencapai Rp14.312 sedangkan tahun 2020 (ketika puncak pandemi covid-19) Rupiah mencapai Rp14.577 per US\$. Fraksi PKS menilai bahwa penetapan nilai tukar yang lebih

optimis sangat penting karena menjadi sinyal positif bagi dunia usaha. Sebagaimana diketahui, sebagian besar pelaku usaha di Indonesia memenuhi bahan baku/penolong dari impor. Dengan demikian diperlukan Rupiah yang lebih kuat agar impor lebih murah. Pemerintah pun berkepentingan terhadap nilai tukar yang lebih kuat, khususnya untuk pembayaran pokok dan bunga utang. Fraksi PKS menilai tantangan menjaga stabilitas nilai tukar ke depan dihadapkan pada kecenderungan penurunan cadangan devisa. Hal tersebut dikarenakan permintaan komoditas dunia cenderung menurun tahun 2023 sehingga pasokan valas dari neraca perdagangan menurun. Semakin berat karena potensi penerimaan devisa diprediksi semakin menurun.

18. Fraksi PKS mendesak pemerintah menekan target suku bunga SUN (10 tahun). Level 7,9 persen sangat mahal sehingga membebani APBN. Tahun lalu, realisasi suku bunga SUN (10 tahun) sebesar 6,35 persen. Seharusnya, angka tahun depan tidak begitu jauh dari realisasi tahun 2021. Beban pembayaran bunga utang pemerintah terus meningkat karena tingginya yield surat utang. Apalagi pokok utang pemerintah meningkat drastis sepanjang masa pandemi Covid-19. Selain itu, suku bunga SUN yang semakin tinggi menunjukkan risiko investasi di Indonesia tinggi. Pemerintah seharusnya lebih berani menetapkan suku bunga yang lebih rendah.
19. Fraksi PKS memandang asumsi ICP sebesar USD 90 per barel dalam RAPBN 2023 cukup moderat mengingat saat inipun harga minyak mentah dunia di kisaran angka tersebut dan sekarang ini sudah berada di level harga sebelum perang Rusia dan Ukraina. Namun demikian, Fraksi PKS memandang asumsi lifting minyak sebesar 660.000 per barel, dan gas bumi sebesar 1,05 juta barel setara minyak per hari adalah lebih ke sikap *business as usual*. Angka asumsi lifting ini lebih mengikuti tren produksi migas kita selama beberapa tahun terakhir ini yang lifting minyaknya semakin menurun. Target APBN yang ditetapkan untuk minyak selalu luput untuk terpenuhi. Pemerintah seakan belum berbuat banyak untuk menaikkan lifting minyak ini. Sementara di sisi gas bumi, liftingnya memang

relatif lebih stabil, namun kalau upaya mencari sumber cadangan migas baru tidak gencar dilakukan oleh Pemerintah, baik lifting minyak maupun gas bumi ini akan terus menurun.

20. Fraksi PKS memandang perlunya Presiden untuk menjamin bahwa APBN 2023 nanti akan menjalankan perannya sebagai alat untuk stabilisasi perekonomian dengan mengantisipasi dampak fluktuasi tingginya harga energi di pasar dunia dengan memberikan bantalan berupa peningkatan subsidi energi dan dana kompensasi sehingga hajat dan kebutuhan rakyat akan energi dapat terpenuhi dengan baik. Hari ini masyarakat masih dikecewakan dengan volume dan ketersediaan Pertalite di SPBU, padahal Pertalite ini adalah jenis bahan bakar minyak kategori khusus penugasan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pertamina untuk menyediakannya. Apalagi beredar perbincangan di publik tentang rencana menaikkan harga Pertalite yang stoknya saja di SPBU tidak tersedia secara konsisten dan memadai.

Indikator Kesejahteraan Sosial

21. Fraksi PKS mendesak pemerintah supaya menurunkan angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2023 dengan berbagai upaya yang lebih serius. Angka pengangguran masih tinggi sebanyak 8,40 juta orang atau 5,83 persen per Februari 2022. Tingkat pengangguran Indonesia tersebut masih belum kembali kepada posisi sebelum pandemi Covid-19 sebesar 6,88 juta orang atau 4,99 persen pada Februari 2020. Pemerintah perlu berupaya memperbaiki masalah struktural pada persoalan ketenagakerjaan di Indonesia. Terkait kualitas ketenagakerjaan Indonesia yang mengalami penurunan beberapa tahun terakhir, tenaga kerja yang memiliki pendidikan tinggi hanya 12 persen saja. Ditambah dengan kurangnya lapangan pekerjaan karena melemahnya dunia usaha dan investasi. Dengan target TPT 2023 sebesar 5,3 - 6,0 seharusnya pemerintah bisa dengan mudah mencapai target tersebut, bahkan idealnya TPT kembali kepada

posisi sebelum pandemi, dengan catatan persoalan strukturalnya bisa diselesaikan oleh pemerintah.

22. Fraksi PKS mengingatkan pemerintah bahwa tingkat pengangguran usia muda di Indonesia merupakan yang tertinggi kedua di kawasan Asia Tenggara berdasarkan data Organisasi Buruh Internasional (ILO). Pengangguran berusia muda di Indonesia sebanyak 16 persen. Sementara negara lain seperti Thailand (7 persen), Vietnam (7,2 persen) Filipina (7,3 persen), bahkan negara yang baru merdeka seperti Timor Leste (13,8 persen) lebih baik dari Indonesia. Sementara menurut BPS Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada penduduk usia 15-25 tahun pada Februari 2022 sebesar 17,08 persen. Tingginya pengangguran muda mengancam bonus demografi Indonesia 2020 – 2030, bahkan bisa menjadi bencana demografi, jika sumber daya manusia usia produktif tidak dimanfaatkan. Selain itu, Pemerintah perlu melihat fenomena semakin besarnya proporsi anak muda yang bekerja di bawah 15 jam satu minggu. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tenaga kerja muda di Indonesia masih kesulitan mendapatkan pekerjaan penuh.

23. Terkait target tingkat kemiskinan sebesar 7,5 – 8,5 Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk sangat berhati-hati dalam melahirkan kebijakan ekonomi yang berdampak luas. Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar Pertalite akan menurunkan daya beli dan konsumsi masyarakat sehingga garis kemiskinan akan naik. Begitupun dengan mengurangi subsidi energi bagi rakyat akan berdampak pada pelebaran jurang kemiskinan. Kerugian yang ditanggung negara akan jauh lebih besar. Seharusnya pemerintah fokus pada penciptaan lapangan pekerjaan, investasi, dan mendorong naiknya daya beli masyarakat. Persentase penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 9,54 persen, menurun 0,60 persen poin terhadap Maret 2021. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 26,16 juta orang. Angka kemiskinan belum kembali ke periode sebelum pandemi sebanyak 24,79 juta jiwa (September 2019). Dimana Jumlah penduduk miskin sampai September 2021 tercatat sebesar 26,5 juta jiwa. Artinya

masih ada 1,71 juta jiwa rakyat miskin terdampak pandemi masih terjebak dalam kubangan kemiskinan.

24. Rasio gini atau indikator ketimpangan pengeluaran meningkat di beberapa tahun terakhir. Data World Inequality Report 2022 menyebut kelompok 50 persen terbawah hanya memiliki 4,48 persen dari total kekayaan rumah tangga nasional pada 2021. Sedangkan kelompok 10 persen teratas menguasai 61,3 persen pada 2021. Target rasio gini 2023 yang dipatok sebesar 0,375-0,378 memerlukan upaya lebih serius dari pemerintah. Karena itu Fraksi PKS mendesak Pemerintahan untuk lebih proaktif dan progresif dalam menyelesaikan permasalahan ketimpangan. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang lebih spesifik untuk mengatasi ketimpangan. Seperti kita ketahui target rasio gini tahun 2021 saja tidak tercapai. Target APBN 2021 dicanangkan rasio gini pada kisaran 0,377 sampai 0,379, sementara realisasinya hanya sebesar 0,381. Memburuknya gini rasio disebabkan pendapatan kelompok miskin jauh menurun daripada kelompok kaya. Berdasarkan sejumlah penelitian, kualitas pertumbuhan Indonesia mengalami penurunan dan hal ini menyebabkan stagnannya koefisien gini.
25. Fraksi PKS memandang target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2023 sebesar 73,31 sampai 73,49 seharusnya mudah tercapai. Mengingat Target IPM tahun 2021 saja gagal dicapai oleh pemerintah, seharusnya pada kisaran 72,78 – 72,95 tetapi hanya mencapai 72,29 saja. Permasalahannya adalah Pemerintah perlu mengejar target IPM pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebesar 75,54. Pemerintah harus lebih serius dalam mengevaluasi dan memperbaiki kegagalan pencapaian tersebut. Selain itu, Pemerintah harus mampu memperbaiki kondisi sosial di daerah-daerah tertinggal. Pemerintah harus menjaga dan meningkatkan efektivitas dana desa, jangkauan listrik, jangkauan keuangan (financial inclusion), serta mendorong realisasi penanaman modal. Selain itu, pemerintah harus mempercepat perbaikan IPM di daerah-daerah yang memiliki IPM di bawah nasional. Fraksi

PKS berpendapat bahwa Pemerintah harus bekerja lebih keras guna merealisasikan target IPM. Sejumlah indikator daya saing menunjukkan bahwa kondisi pendidikan dasar dan kesehatan di Indonesia belum mengalami banyak perbaikan selama empat tahun terakhir. Berdasarkan rilis World Economic Forum; Global Competitiveness Index, indikator health and primary education mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

26. Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk terus memperbaiki Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) baik dari sisi kuantitas ataupun sisi kualitasnya. Target yang dipatok untuk tahun 2023 yaitu NTP 105-107 dan NTN 107-108. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Nilai Tukar Petani (NTP) nasional Juli 2022 sebesar 104,25 atau turun 1,61 persen dibanding NTP bulan sebelumnya. Menjadi catatan adalah kecenderungan nilai tukar petani padi selalu lebih rendah dibandingkan NTP petani secara umum. Artinya memang petani padi masih menjadi kelompok yang paling rendah NTP nya dibanding petani lainnya. Padahal Pidato Presiden pada pengantar RAPBN 2023 menyebut telah terjadi swasembada beras konsumsi, ini ironis karena petani padi justru paling rendah kesejahteraannya. NTP subsektor tanaman pangan pada tahun 2021 sebesar 98,21 turun dari tahun sebelumnya, dan sampai Juli 2022 angkanya kembali merosot menjadi 95,28. NTP subsektor tanaman pangan dibawah 100, berarti petani padi mengalami defisit. Tingkat kesejahteraan petani mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode sebelumnya.

27. Fraksi PKS mendesak pemerintah agar serius merealisasikan program ketahanan dan kedaulatan pangan dengan alokasi anggaran yang signifikan, dengan harapan agar kesejahteraan petani dan nelayan semakin meningkat. Data Sekertariat Negara menyebut pada 2022 ada 147 kabupaten / kota wilayah pesisir dengan 1,3 juta (12,48 persen) penduduk miskin seperti nelayan masuk kategori desa miskin ekstrim. Pemerintah juga perlu meningkatkan pemberian insentif dan subsidi pertanian secara memadai, seperti subsidi benih, subsidi

pupuk, asuransi pertanian, jaminan pembelian, dan lain sebagainya. Hal ini sangat penting mengingat permasalahan ketersediaan, kecukupan, dan kenaikan harga-harga pangan selalu berimbas pada turunnya daya beli dan kesejahteraan rakyat secara luas.

Penerimaan Negara

28. Fraksi PKS memandang bahwa upaya reformasi perpajakan belum memberikan hasil yang optimal. Berbagai upaya reformasi perpajakan sudah dilaksanakan sejak lama. Selain itu, optimalisasi perluasan basis pemajakan dan ekstensifikasi perpajakan juga menjadi agenda pemerintah pada tahun 2023. Namun demikian, sumber penerimaan pajak baru belum banyak muncul dan dioptimalkan. Struktur penerimaan perpajakan masih belum banyak berubah. Kejadian luar biasa seperti ledakan komoditas masih menjadi sumber utama dalam mendorong penerimaan perpajakan. Demikian halnya pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di mana pada 2022, bea keluar meningkat signifikan akibat ledakan komoditas. Secara historis, tren penerimaan perpajakan juga berfluktuasi dan tidak stabil sebagai dampak dari ketergantungan terhadap komoditas tersebut.
29. Fraksi PKS memperingatkan bahwa ledakan komoditas dapat menjadi pedang bermata dua. Pertama, ledakan komoditas dapat memberikan penerimaan jangka pendek yang signifikan. Namun, apabila peluang penerimaan ini tidak dikelola dengan baik maka peluang ini akan sulit dimaksimalkan. Tata kelola penerimaan negara memainkan peranan penting dalam mengoptimalkan sumber yang ada. Kedua, di sisi lain ledakan komoditas sekaligus menjadi disinsentif bagi proses industrialisasi. Pada saat ini, eksploitasi komoditas mentah menjanjikan keuntungan ekonomi singkat dibandingkan berinvestasi membangun industri. Sebaliknya, industri mendapatkan tekanan karena harus merogoh pengeluaran bahan baku yang semakin mahal.
30. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut Fraksi PKS mendorong agar pemerintah dapat meningkatkan pajak ekspor untuk komoditas-komoditas

sumber daya alam kita. Alih-alih menurun, target penerimaan PNBPN pada 2023 mustinya dapat ditingkatkan. Ketentuan royalti juga perlu dinaikkan. Restriksi melalui pajak ekspor ini relatif memberikan distorsi terhadap perekonomian yang lebih kecil dibandingkan dengan mengenakan mandatori pasokan domestik. Sebab, kenaikan harga komoditas sumber daya alam di pasar internasional sebagian besar masih dinikmati oleh pemilik tambang. Melalui peningkatan ini, nisbah ekonomi dari ledakan harga komoditas dapat lebih terdistribusi secara adil kepada rakyat. Tambahan pungutan ekspor dapat menjadi keranjang penerimaan baru bagi Pemerintah yang relatif lebih besar. Hal ini dapat mengantisipasi agar sumber daya alam tidak semakin dieksploitasi. Pemerintah harus fokus pada dua hal berikut: memaksimalkan ruang penerimaan di tengah ledakan komoditas dan fokus terhadap upaya industrialisasi. Jangan sampai banyak celah kelonggaran pungutan justru dibuka di tengah ledakan komoditas yang ada.

31. Fraksi PKS memandang bahwa reformasi perpajakan adalah sangat berkaitan dengan keadilan pajak. Pajak merupakan cerminan dari dinamika dan mekanisme perekonomian. Namun demikian, penerimaan perpajakan di sisi lain justru bertolak belakang dengan dinamika perekonomian yang ada. Manufaktur menjadi menyumbang terbesar dalam struktur perpajakan dengan kontribusi sebesar 30 persen terhadap total penerimaan pajak. Padahal perekonomian sedang berada pada jalur deindustrialisasi di mana kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian sebesar 20 persen dan menunjukkan tren penurunan
32. Fraksi PKS memandang bahwa dampak dinamika global akan terlihat pada tahun depan. Amerika Serikat secara teknis telah mengalami resesi karena pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi pada sejak dua triwulan terakhir ini. Jika ini terjadi pada tahun mendatang, maka permintaan ekspor dari negara tersebut akan menurun. Jika ini terjadi, ekspor negara berkembang seperti China dan Indonesia ke AS akan melambat. Padahal, di sisi lain China merupakan tujuan energi dan komoditas utama Indonesia. Perlambatan ini tentu akan

memberikan kontraksi pada ekspor utama Indonesia seperti batubara dan CPO. Risiko moderasi harga akan terjadi dan tentunya sangat berpengaruh terhadap potensi penerimaan ke depan. Demikian halnya dengan negara-negara tradisional tujuan ekspor lainnya. Peningkatan inflasi pada negara-negara tersebut turut memicu kenaikan tingkat suku bunga sehingga memberikan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi.

33. Namun demikian, Fraksi PKS melihat pemerintah belum cukup serius dalam menyusun jalan keluar potensi penurunan pendapatan ini. Sampai saat ini Pemerintah hanya dapat menjelaskan berbagai potensi-potensi penerimaan lain yang dapat digunakan untuk mengkompensasi ketika ledakan komoditas telah berakhir misalnya melalui penyesuaian berbagai regulasi/kebijakan di sektoral seperti munculnya penyesuaian tarif, potensi obyek-obyek penerimaan baru, dan perbaikan tata kelola seperti sinergi, penguatan pengawasan, penagihan piutang. Namun demikian berapa jauh peluang tersebut dapat mengkompensasi hilangnya penerimaan akibat berakhirnya ledakan komoditas belum diproyeksikan oleh Pemerintah.

Belanja Negara & Belanja Pemerintah Pusat

34. Fraksi PKS mencatat bahwa Belanja Negara dalam Postur RAPBN tahun 2023 mengalami penurunan angka nominal menjadi sebesar Rp3.041,7 triliun yang terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.230,0 triliun dan Transfer Ke Daerah Rp811,7 triliun. Pada tahun sebelumnya berdasarkan Perpres 98 tahun 2022 adalah Rp3.406,4 triliun yang terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.301,6 triliun dan Transfer Ke Daerah Sebesar Rp804,8 triliun. Hal ini mengakibatkan penurunan defisit menjadi Rp598,2 triliun atau 2,85 persen terhadap PDB yang sebelumnya adalah 4,50 persen atau Rp840,2 triliun. Namun, perlu untuk menjadi perhatian Pemerintah bahwa pelaksanaan untuk mencapai target defisit tersebut jangan sampai membuat kondisi ekonomi masyarakat utamanya yang berada di golongan rentan dan miskin menjadi semakin tertekan

dan berat. Fraksi PKS juga mengingatkan Pemerintah dengan serius agar melihat rakyat tidak hanya sebagai objek sumber penerimaan negara yaitu pajak, tapi juga harus melihat lebih mendalam dari sisi bagaimana caranya agar rakyat miskin dan rentan dapat tetap hidup dan naik kelas. Program Subsidi dan Bantuan Sosial untuk masyarakat ekonomi lemah dan rentan agar terus dipertahankan bahkan jika memungkinkan ditingkatkan. Karena, pada akhirnya semakin sejahtera rakyat, maka kontribusi terhadap negara berupa pajak juga dapat semakin meningkat. Secara umum, Fraksi PKS mendesak pemerintah agar Belanja Negara dan Belanja Pemerintah Pusat dapat menstimulus terjadinya percepatan pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

35. Fraksi PKS memperhatikan bahwa sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2022 mencapai 5,01 persen secara tahunan. Fraksi PKS berpandangan bahwa komponen konsumsi pemerintah masih kurang optimal dalam pertumbuhan ekonomi di kuartal I/2022. Pertumbuhan ekonomi di kuartal I/2022 lebih banyak kontribusi oleh laju pertumbuhan komponen ekspor sebesar 16,22 persen, konsumsi rumah tangga 4,34 persen dan investasi sebesar 4,09 persen. Sedangkan, komponen konsumsi pemerintah mengalami perlambatan, yakni -7,74 persen yoy. Kemudian, tradisi pola belanja pemerintah yang menumpuk di akhir tahun membuat daya ungkit konsumsi pemerintah tidak optimal mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga, Fraksi PKS berpandangan bahwa pada pembahasan nanti harus dikemukakan mekanisme bagaimana agar APBN 2023 dapat berperan terhadap pemilihan ekonomi dengan lebih signifikan.
36. Fraksi PKS mendorong Pemerintah untuk memacu industri dalam negeri yang berorientasi memenuhi kebutuhan lokal di tengah tantangan lonjakan harga komoditas global terkini. Fraksi PKS mendesak Pemerintah agar investor yang masuk dipilih pada sektor-sektor yang dapat mengurangi ketergantungan kebutuhan impor. Pemerintah harus berupaya menghindari barang impor sejenis konsumsi, atau produk yang sebetulnya dapat diproduksi di dalam

negeri. Maka Fraksi PKS mendorong kebijakan Belanja negara atau Belanja Pemerintah Pusat juga perlu diarahkan untuk mendukung industri dalam negeri yang berorientasi memenuhi kebutuhan lokal demi kesejahteraan rakyat.

37. Fraksi PKS mengingatkan Pemerintah untuk tetap waspada terhadap gelombang Covid-19, walau jumlah pasien dirawat mengalami pengurangan pada saat ini bukan berarti ancaman Covid-19 telah sirna dan aman. Fraksi PKS berpendapat bahwa Pemerintah masih perlu untuk menyiapkan anggaran untukantisipasi terjadinya pemburukan kesehatan kepada masyarakat melalui sistem kesehatan nasional yang profesional, ramah, terpadu, integratif, berhasil guna dan berdaya guna.
38. Pemerintah hendaknya merancang dengan serius dan menata kebijakan Belanja dalam APBN tahun 2023 dengan melakukan penguatan *spending better* melalui pengendalian belanja agar lebih efisien, lebih produktif, dan menghasilkan multiplier effect yang kuat terhadap perekonomian serta efektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Belanja Negara ini bersumber dari dana masyarakat terutama Pajak. Maka, pencegahan dan penegakan hukum terhadap kejahatan berupa penyimpangan, penyalahgunaan, dan korupsi dalam pelaksanaan belanja negara harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Fraksi PKS mendesak Pemerintah untuk melakukan Efisiensi biaya birokrasi pusat dan daerah, mitigasi terhadap pelbagai kemungkinan dan kebutuhan penting-mendesak, serta memperkokoh pondasi ekonomi agar kedepannya dapat terbebas dari *middle income trap*. Pemerintah wajib melakukan *spending better* dan mempertimbangkan *value for money* dari setiap rupiah yang dibelanjakan, serta mendorong belanja dengan orientasi hasil (*result-based budgeting*). Fraksi PKS mendorong Pemerintah agar efisisensi belanja bukan prioritas berupa penghematan belanja barang non operasional seperti perjalanan dinas, paket-paket meeting dan seterusnya harus terus dilakukan.

39. Fraksi PKS mendorong Pemerintah agar senantiasa mengalokasikan anggaran Pendidikan sebagaimana *mandatory spending* 20 persen dari APBN oleh amanat konstitusi secara efektif dan efisien. Dengan alokasi anggaran tersebut, Indonesia seharusnya mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya yang memiliki keunggulan komparatif dari sisi jumlah penduduk. Namun kenyataan yang terjadi kualitas sumber daya manusia Indonesia belum dapat bersaing secara optimal di wilayah dan global. Maka, alokasi dan realisasi belanja pendidikan oleh Pemerintah selama ini belum optimal keluaran (*output*) dan terlebih lagi hasilnya (*outcome*). Terlebih lagi selama masa pandemi covid-19, pemerintah perlu segera mengeluarkan kebijakan untuk menutupi *learning loss* dampak dari kebijakan pembelajaran jarak jauh. Disparitas digital antar daerah di Indonesia sangat tinggi. Sehingga angka putus sekolah bertambah, dan peserta pendidikan dari keluarga miskin tidak dapat mengikuti persekolahan karena tidak memiliki alat komunikasi internet. Kemudian diperparah juga dengan beberapa daerah di Indonesia yang tidak mendapatkan jaringan internet. Kemudian, Fraksi PKS mendesak Pemerintah untuk terus meningkatkan spending better belanja pendidikan agar ketimpangan akses pendidikan terutama menengah ke atas, ketersediaan sarana dan prasana yang belum merata, *mismatch* pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri dapat segera terselesaikan. Fraksi PKS mencatat terjadi penurunan anggaran pendidikan 5,8 persen dalam RAPBN 2023 jika dibandingkan dengan outlook APBN 2022 19,9 persen, namun besaran anggaran RAPBN 2023 menjadi lebih besar Rp608,3 triliun jika dibandingkan dengan outlook 2022 Rp574,9 triliun.

Fraksi PKS juga mendorong agar Pemerintah memperhatikan ketimpangan kualitas antara layanan pendidikan di satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama, termasuk di dalamnya ketimpangan kualitas antara layanan satuan pendidikan formal dengan kekhasan agama yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.

Pasalnya, satuan pendidikan formal semisal madrasah yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat yang jumlahnya 93 persen dari total madrasah yang ada belum mendapat perhatian yang memadai dari pemerintah selama ini. Sebab itu, pemerintah perlu untuk melakukan pemerataan kuantitas sesuai kebutuhan dan pemerataan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dengan terencana. Fraksi PKS berpandangan pemerintah masih perlu melanjutkan penguatan investasi di bidang pendidikan seperti perluasan program beasiswa, pengembangan inovasi, peningkatan kualitas pendidik di satuan pendidikan, baik yang umum maupun dengan kekhasan agama, dari jenjang PAUD hingga pendidikan tinggi, adopsi teknologi informasi komunikasi, pemajuan kebudayaan yang berlandaskan Pancasila dan penguatan perguruan tinggi kelas dunia.

40. Fraksi PKS mendorong secara terus menerus agar kualitas dan kuantitas anggaran belanja kesehatan dapat dijaga kualitas dan kuantitasnya sesuai dengan amanat undang-undang kesehatan yaitu minimal 5 persen dari APBN. Pemerintah perlu memastikan agar belanja kesehatan mempertimbangkan value of money dan efektifitas dalam capaian kinerja output dan outcome termasuk seperti meningkatkan capaian jumlah orang sakit yang berkurang dan jumlah warga gaya hidup sehat yang bertambah. Pemerintah masih harus terus memperbaiki sistem jaminan kesehatan Nasional agar dapat berkelanjutan. Tiga kriteria penting untuk mengukur pemenuhan hak kesehatan adalah ketersediaan (availability), keterjangkauan (accessibility) dan mutu (quality). Pemerintah perlu memastikan pelaksanaan peningkatan kuantitas dan kualitas layanan dari Sistem JKN dalam APBN 2023.

Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam keberpihakan Pembangunan tahun 2023. Namun, Fraksi PKS memperhatikan bahwa dalam RAPBN 2023 Pemerintah mengurangi anggaran DAK Fisik Kesehatan, dari 15,77 triliun pada tahun 2022 menjadi 13,1 triliun untuk TA 2023. Padahal selama pandemi Covid-19 sangat terlihat sekali kekurangan kapasitas rumah sakit dan infrastruktur kesehatan di berbagai kota

dan kabupaten. Justru pada sisa periode RPJMN IV 2020-2024 seharusnya Pemerintah melakukan percepatan perbaikan infrastruktur kesehatan, agar mampu memenuhi kebutuhan kesehatan rakyat secara lebih berkualitas. Menurut data Kementerian Kesehatan, pada tahun 2020 rasio tempat tidur rumah sakit di Indonesia sebesar 1,4 per 1.000 penduduk. Ini hanya sedikit di atas standar minimal WHO, yaitu 1:1.000 penduduk. Malahan di tingkat kabupaten kota, sebagian memiliki rasio di bawah 1 per 1.000 penduduk. Di Provinsi Jawa Barat saja ada 14 kabupaten yang rasio tempat tidur RS di bawah 1:1.000. Pengurangan alokasi DAK Fisik Kesehatan ini tidak sejalan dengan 5 Agenda APBN 2023, yang menyatakan akan melakukan akselerasi reformasi sistem kesehatan dan perlindungan sosial.

Fraksi PKS menilai Pemerintah tidak konsisten dalam menyusun Arah Kebijakan, Strategi Pembangunan dan Prioritas Pembangunan. Pada arah kebijakan dan strategi pembangunan, nampak urutan teratas adalah kemiskinan dan peningkatan sumber daya manusia. Kemudian pada strategi pembangunan, urutan teratas adalah penguatan sistem jaminan sosial, modernisasi pertanian, pemerataan pembangunan, baru diikuti oleh penguatan sistem kesehatan nasional dan Pendidikan. Namun pada prioritas nasional, urutan teratas adalah ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah, baru kemudian diikuti oleh peningkatan sumber daya manusia (*Money before People*). Oleh karena itu, Fraksi PKS menyarankan Pemerintah untuk menyusun kembali prioritas pembangunan agar sesuai dengan arah kebijakan dan strateginya.

41. Fraksi PKS menilai bahwa walaupun Fungsi Kesehatan pada periode tahun 2018-2023 mengalami pertumbuhan rata-rata 33,9 persen, jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode 2017-2022 yaitu 23,7 persen. Namun demikian, Fraksi PKS melihat bahwa anggaran Fungsi Kesehatan menunjukkan tren penurunan dari tahun 2021-2023. Bahkan RAPBN 2023 sebesar 97,6 triliun rupiah sudah lebih rendah dari realisasi 2020 sebesar 105,1 triliun. Padahal

selain upaya transformasi, Program Revitalisasi Pelayanan Kesehatan dan Percepatan Pemulihan pandemi masih menjadi prioritas Pemerintah.

Selain itu, target output prioritas untuk PBI tidak mengalami peningkatan dari TA 2022, tetap sebanyak 96,8 juta jiwa. Dengan bertambahnya jumlah penduduk miskin, berarti jumlah keluarga rentan juga mengalami peningkatan. Dan ini berdampak pada kemampuan membayar iuran BPJS. Salah satu upaya percepatan penurunan stunting adalah melalui perawatan dan intervensi medis yang di tangani dokter, mereka yang menderita masalah gizi (KEK maupun Stunting harus dipastikan juga mendapat pelayanan medis melalui PBI). Begitu juga terkait sasaran penerima makanan tambahan menurun dari 96.700 ibu hamil kurang energi kronis (KEK) dan 159.500 balita kurus pada TA 2022, menjadi hanya 55.556 ibu hamil KEK dan hanya 138.889 balita kurus. Ini sungguh mengherankan, mengingat Program Percepatan Penurunan Stunting merupakan program prioritas RPJMN IV 2020-2024, sehingga logikanya sasaran ibu hamil KEK dan balita kurus setidaknya sama dari tahun lalu.

42. Salah satu Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan salah satu sasaran adalah meningkatnya kualitas pemuda. Namun, proporsi anggaran program kepemudaan masih rendah dan mengalami penurunan di RAPBN 2023. Bahkan dari tahun ketahun anggaran untuk program kepemudaan selalu dibawah 10 persen dari anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pada RAPBN 2023 anggaran program untuk kepemudaan turun menjadi Rp151,2 miliar dari tahun 2022 Rp174,7 miliar. PKS menyoroti rendahnya anggaran untuk program kepemudaan ini hal ini bertentangan dengan rencana kerja Pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
43. Meskipun mengalami dampak yang cukup signifikan akibat pandemi Covid-19, Kementerian pariwisata tetap perlu didorong untuk melakukan peningkatan pembangunan bidang pariwisata; dimana aktivitas pariwisata perlu tetap dipersiapkan dan dikembangkan. Fakta bahwa secara terus-menerus terjadinya

pengurangan alokasi anggaran untuk Kementerian Parekraf /Baparekraf, (dari Rp3,79 miliar pada tahun 2022, turun menjadi Rp3,38 miliar di tahun 2023) menjadi pertanyaan. Salah satu hasil telaah dari pusat kajian anggaran DPR RI, menyatakan bahwa salah satu isu penting bagi Kementerian Parekraf /Baparekraf adalah terkait dengan Pelaku/ SDM Parekraf yang Belum Memenuhi baik dari segi Jumlah maupun Kompetensinya. Fraksi PKS menilai pada tahun 2023 tidak terdapat target output pada pelatihan dan sertifikasi SDM pariwisata, yang merupakan dampak dari Pengurangan anggaran secara terus menerus, sementara target kerja terus meningkat. Kemudian, Fraksi PKS juga menyoroti bahwa Kemenparekraf/ Barekraf belum memiliki data SDM pariwisata di seluruh Indonesia. Menyikapi hal tersebut, Fraksi PKS mengusulkan adanya penambahan anggaran dan perhatian serius dari pemerintah terhadap Kemenparekraf/ Barekraf, sehingga kegiatan-kegiatan meningkatkan kualitas SDM pariwisata dapat dilaksanakan guna menguatkan daya tawar SDM pariwisata kita baik di lingkup nasional maupun internasional.

44. Fraksi PKS memandang bahwa rencana anggaran subsidi RAPBN tahun 2023 sebesar Rp297,2 triliun dapat dipandang sebagai besaran awal yang memungkinkan adanya opsi peningkatan anggaran subsidi seiring dengan kemampuan keuangan negara yang penerimaannya bertambah dan dengan naiknya harga komoditas dunia. Fraksi PKS mendorong Pemerintah melaksanakan program pengelolaan subsidi yang tepat sasaran dan memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial agar hak warga masyarakat yang miskin dapat dipenuhi kebutuhannya sambil secara umum dapat mempertahankan daya beli masyarakat. Fraksi PKS mencatat dalam RAPBN 2023 Subsidi Energi mengalami peningkatan dari Rp208,9 triliun menjadi Rp210,7 triliun dan Subsidi Non Energi dari 75,7 berdasarkan outlook 2022 direncanakan Rp297,2 triliun pada RAPBN 2023.

Fraksi PKS mengingatkan Pemerintah bahwa pencabutan atau pengurangan Subsidi BBM akan memberikan pengaruh yang besar juga bagi kalangan dunia

usaha, terutama sektor UMKM dan usaha kecil informal lainnya yang seringkali tidak tersentuh oleh program bantuan sosial Pemerintah. Selama ini, sebagian besar sektor UMKM dan informal tersebut memanfaatkan BBM bersubsidi dalam menjalankan usahanya. Apalagi sebelumnya kalangan tersebut juga sudah terkena dampak dari pandemi covid dan kenaikan harga Minyak Goreng. Kenaikan BBM bersubsidi dikhawatirkan akan semakin membuat pengusaha UMKM dan informal lainnya semakin terpuruk, dikhawatirkan angka kemiskinan dan pengangguran akan semakin meningkat. Fraksi PKS berpandangan bahwa kebijakan subsidi adalah salah satu bentuk hadirnya negara dalam melindungi masyarakat miskin dan rentan atau ekonomi lemah.

Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk mendukung dan memfasilitasi UMKM agar naik kelas bahkan berdaya saing internasional. Fraksi PKS memperhatikan bahwa Pemerintah perlu untuk mendukung partisipasi UMKM dalam Ekonomi digital dan Pasar Internasional. Peran UMKM dalam Pasar Internasional diharapkan mampu meningkatkan ekspor langsung dan ekspor tidak langsung oleh UMKM. Mengingat, sektor UMKM memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan jumlah pelaku, serapan tenaga kerja, dan kontribusi terhadap PDB, maka UMKM tidak boleh dipandang sebelah mata. Pelaku UMKM yang mencapai 64,1 juta atau mencapai 99 persen dari jumlah pelaku usaha yang ada di Indonesia mampu menyerap tenaga kerja mencapai 116 juta. Kemudian, UMKM juga berkontribusi 58 persen terhadap PDB Indonesia. Namun nilai ekspor UMKM masih berada di angka 16 persen dari total ekspor menurut data Kemenkop (2019). Kebijakan untuk mendukung agar UMKM berdaya saing internasional salah satunya adalah dengan kemampuan akses UMKM melalui aplikasi dan internet, kemudian diikuti dukungan terhadap fasilitas pembiayaan atau permodalan.

45. Fraksi PKS memandang strategi pembangunan tahun 2023, yakni percepatan transisi energi dengan pengembangan energi ramah lingkungan adalah suatu keniscayaan dalam di era di mana dampak perubahan iklim semakin nyata dan

menipisnya ketersediaan energi fosil. Demikian pula tentang arah kebijakan pembangunan yang ditempuh dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, yakni pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim). Namun demikian proses transisi ini harus didesain sedemikian rupa agar sesuai dengan kemampuan anggaran dan ketersediaan sumber daya energi terbarukan dan tingkat keekonomiannya. Jangan sampai transisi ini menaikkan harga energi yang harus dibayar masyarakat dan membebani anggaran APBN serta keuangan BUMN Energi yaitu Pertamina dan PLN.

46. Fraksi PKS memandang Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang infrastruktur energi terbarukan sebesar Rp88 miliar yang digunakan untuk mendorong percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar guna mendukung peningkatan konektivitas dan elektrifikasi untuk pembangunan inklusif di daerah afirmasi masih sangat kurang dan jauh dari kondisi ideal. Setelah Indonesia merdeka selama 77 tahun, masih banyak rakyat yang belum merasakan akses ke energi listrik. Menurut data PLN, terdapat lebih dari 4.700 desa yang belum menikmati listrik PLN saat ini dan tercatat rasio desa berlistrik yang bersumber dari PLN adalah baru sebesar 90,78 persen dan bahkan beberapa provinsi tercatat masih ada yang di bawah 80 persen. Penyediaan listrik ini dapat diarahkan untuk pengembangan energi terbarukan disesuaikan dengan ketersediaan di daerah afirmasi tersebut.

47. Fraksi PKS memandang pagu anggaran Kementerian Perindustrian dalam RAPBN TA 2023 yang direncanakan sebesar Rp2,9 triliun ini masih jauh panggang dari api untuk kondisi ideal. Apalagi dikaitkan dengan target besar Pemerintah yang ambisius untuk pembangunan hilirisasi industri sumber daya alam, optimalisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui percepatan fasilitasi sertifikasi TKDN produk dalam negeri serta penumbuhan serta pengembangan wirausaha baru industri kecil dan menengah (IKM). Apalagi baru-baru ini masyarakat dikejutkan dengan transaksi Tesla dalam kontrak pembelian nikel dengan perusahaan smelter asing Cina yang ada di Indonesia. Seharusnya

Indonesia bisa mendapatkan nilai tambah yang lebih besar apabila proses hilirisasi industri sumber daya alam direncanakan dengan tuntas, matang dan terintegrasi. Ke depannya Indonesia harus bisa membangun smelter dan menjual langsung produknya ke industri baterai dan kendaraan listrik. Tidak seperti sekarang ini yang tidak lebih hanya menjadi broker bagi perusahaan asing Cina, padahal sumber daya alamnya yaitu nikel adalah bangsa kita yang punya.

48. Fraksi PKS memandang DAK nonfisik dana penguatan kapasitas kelembagaan sentra industri kecil dan menengah (IKM) sebesar Rp200 miliar ini masih kecil dan harus ditingkatkan di masa yang akan datang. Hal ini karena sebagian besar masyarakat masih bekerja di sektor IKM ini. Fraksi PKS mengharapkan dana ini digunakan sebaik-baiknya dengan memilih daerah dan provinsi-provinsi yang mempunyai daya ungkit industri yang signifikan bagi pengembangan sektor ekonomi dengan *multiplier effect* yang besar dengan memanfaatkan sumber daya bahan baku dari dalam negeri.
49. Fraksi PKS memandang anggaran BRIN di tahun 2023 yang direncanakan sebesar Rp6.388,0 Miliar yang antara lain untuk pelaksanaan kegiatan penelitian pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap), pembangunan infrastruktur riset strategis, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia iptek masih kecil dan ke depannya perlu ditingkatkan besarannya. Hal ini karena kinerja riset dan inovasi sangat menentukan daya saing ekonomi dan industri nasional dalam jangka panjang. Namun demikian, Fraksi PKS berpandangan agar anggaran tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan memprioritaskan bidang-bidang yang menjadi hajat masyarakat seperti bidang pangan, energi, dan kesehatan yang selama ini telah menimbulkan masalah nyata seperti naiknya harga pangan, energi dan wabah Covid-19, penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak maupun ancaman baru seperti wabah *monkey pox*.
50. Fraksi PKS mencermati kucuran Penyertaan Modal Negara (PMN) ke BUMN yang sebagian besar ditujukan untuk beberapa proyek infrastruktur dan pembangunan jalan. Fraksi PKS mengingatkan Pemerintah bahwa beban APBN tahun 2023 ini

sangat berat. Defisit APBN tahun 2023 sebesar Rp598,2 atau 2,81 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), tentu akan menambah beban pelaksanaan anggaran tahun 2023 jika tidak dikelola dengan tepat. Fraksi PKS memandang dari sisi prioritas bahwa PMN untuk beberapa BUMN belum begitu mendesak diperlukan. Misalnya saja PMN untuk PT KAI sebesar Rp4,10 Triliun yang ditujukan untuk penugasan dalam rangka memenuhi setoran modal porsi Indonesia untuk penambahan pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Fraksi PKS memandang bahwa proyek konsorsium antara perusahaan China dan empat perusahaan BUMN ini akan membuat BUMN kita berdarah-darah, mengingat di awal perjalanannya proyek KCJB digarap dengan menggunakan skema *business to business (b to b)* namun justru diambilalih pemerintah yang imbasnya melibatkan perusahaan BUMN yang tentunya akan menambah beban operasional yang bisa menyebabkan risiko *collapse*.

51. Fraksi PKS juga menyoroti program revitalisasi pasar rakyat yang dilakukan Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan. Jika dilihat dalam Buku III Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA – K/L) Tahun anggaran 2023 sampai dengan Triwulan I tahun 2022 belum ada satupun pasar rakyat yang dibangun/direvitalisasi, padahal Pemerintah menargetkan ada sebanyak 84 pasar rakyat yang dibangun/direvitalisasi sepanjang tahun 2022. Selain itu Revitalisasi Pasar Rakyat juga merupakan amanat UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dalam pasal 13 ayat (1), (2) dan (3), dan program revitalisasi pasar rakyat masuk ke dalam program Prioritas Nasional Kesatu yang dilaksanakan demi mewujudkan Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Sepanjang tahun 2018-2021 diakui Pemerintah sudah ada sebanyak 657 unit pasar rakyat yang dibangun atau direvitalisasi. Namun sayangnya revitalisasi pasar rakyat yang dilakukan selama ini cenderung hanya fokus pada pembangunan fisik saja, sementara pembangunan nonfisik seperti faktor keamanan, kebersihan dan kenyamanan tidak terlalu mendapatkan perhatian yang maksimal bahkan

cenderung diabaikan. Oleh karenanya Fraksi PKS dalam APBN 2023 mendorong agar Pemerintah harus dapat mewujudkan pasar rakyat yang nyaman, aman, dan berdaya saing sehingga bisa menciptakan ketahanan ekonomi bagi bangsa Indonesia dan kesejahteraan yang berkeadilan bagi rakyat Indonesia. Terutama dimana Pemerintah menargetkan untuk membangun atau revitalisasi 60 unit pasar rakyat.

52. Fraksi PKS secara umum berpandangan bahwa pembangunan IKN belum mendesak sehingga dapat ditunda pelaksanaannya sehingga APBN 2023 dapat fokus kepada program program yang langsung berdampak kepada rakyat rentan dan miskin secara luas. Namun walau bagaimanapun secara khusus, Fraksi PKS berpandangan bahwa Pemerintah perlu memberikan penjelasan menyeluruh terkait rencana pembangunan IKN secara teknis yang dilengkapi dengan rencana pembiayaannya secara mendetail. Fraksi PKS berpendapat anggaran pembangunan IKN sebesar Rp5 triliun pada TA 2022 dan rencana anggaran pembangunan IKN sebesar Rp20,8 triliun pada TA 2023 masih belum disertai dengan perencanaan jelas dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Fraksi PKS mengkhawatirkan risiko akan terjadi *cost overrun* seperti halnya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung jika pembangunan IKN dilaksanakan tanpa perencanaan yang matang dan tergesa-gesa. Kekhawatiran ini diperkuat dengan jawaban KemenPUPR terhadap pertanyaan Anggota DPR RI Komisi V pada Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama KemenPUPR terkait pagu anggaran TA 2023, bahwa berdasarkan SB Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.301/ M.PPN/ D.8/ PP.04.02/ 04/ 2022 dan Menteri Keuangan Nomor S-353 / MK.02 / 2022 terkait Pagu Indikatif TA 2023, telah dicadangkan alokasi anggaran sebesar Rp27,6 Triliun untuk kebutuhan pembangunan IKN yang pemanfaatannya akan dibahas lebih lanjut dengan Badan Otorita serta K/L terkait untuk memperdalam rincian kegiatan pembangunan, desain, target, alokasi beserta pelaksana kegiatan. Berdasarkan penjelasan KemenPUPR ini terlihat jelas bahwa Pemerintah belum memiliki rencana kegiatan pembangunan secara rinci. Oleh karena itu kembali

lagi Fraksi PKS berpandangan bahwa pembangunan dan pemindah IKN belum menjadi kebutuhan yang mendesak pada tahun 2023 sehingga sebaiknya program-program terkait hal tersebut ditunda.

Fraksi PKS memperhatikan bahwa pemerintah lebih memprioritaskan anggaran pembangunan IKN dibandingkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program padat karya di KemenPUPR. Dimana pada TA 2023 KemenPUPR hanya menganggarkan sekitar Rp13,6 Triliun untuk program padat karya, yang belum mengalami peningkatan sejak TA 2022 dengan anggaran sebesar Rp13,64 Triliun. Padahal pada TA 2021 anggaran program padat karya di KemenPUPR adalah sebesar Rp24,27 Triliun. Sehingga dengan anggaran TA 2023 ini diperkirakan hanya akan mampu menyerap tenaga kerja padat karya sekitar 650 ribu orang saja, yang jauh dibawah TA 2021 yang bisa menyerap 1,23 juta orang. Fraksi PKS berpandangan bahwa pembangunan infrastruktur melalui program padat karya dalam jangka pendek dapat berefek ganda. Program ini selain dapat menyediakan kebutuhan infrastruktur masyarakat juga dapat menciptakan lapangan kerja baru untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19.

Fraksi PKS juga berpandangan titik berat pembangunan infrastruktur Pemerintah pada IKN dapat mengurangi capaian pembangunan infrastruktur di sektor lainnya yang juga membutuhkan perhatian. Sebagai contoh adalah pembangunan infrastruktur agar masyarakat mendapatkan akses terhadap air minum aman. Saat ini Indonesia sendiri masih sangat tertinggal dari banyak negara tetangga ASEAN dalam penyediaan air minum aman. Dimana pencapaian akses air minum aman baru sekitar 11 persen dan akses layak dasar air minum sekitar 92 persen, dimana angka ini sangat jauh tertinggal dari negara ASEAN lainnya. Indonesia berada di peringkat kedua dari bawah di ASEAN menurut data Joint Monitoring Program (JMP) WHO-UNICEF pada tahun 2017. Pada saat itu negara tetangga seperti Malaysia sudah mencapai 90 persen akses air minum aman dan tinggal 3 persen penduduk Malaysia yang hanya mendapatkan akses

layak dasar air minum. Negara ASEAN lain seperti Filipina pun memiliki peringkat di atas Indonesia dimana 47 persen penduduknya telah mendapatkan akses aman air minum dan 47 persen lainnya mendapatkan akses layak dasar. Data BPS juga menunjukkan pada tahun 2021 masih terdapat 22 Provinsi yang memiliki Persentase dibawah rata-rata nasional terkait Rumah Tangga dengan Akses Layanan Sumber Air Minum Layak Dan Berkelanjutan. Dimana Provinsi Bengkulu dan Papua memiliki prosentase terendah yaitu sebesar 44,99 persen dan 55,49 persen. Oleh sebab itu Fraksi PKS berpandangan Pemerintah seharusnya memberikan perhatian lebih terhadap penyediaan akses air minum masyarakat ini dengan meningkatkan dan memberikan porsi anggaran yang lebih besar. Jangan sampai pembangunan IKN menimbulkan kesenjangan baru, karena kurangnya anggaran KemenPUPR yang seharusnya bisa digunakan untuk peningkatan akses air minum masyarakat. Selain itu Fraksi PKS juga berpandangan bahwa Pemerintah Pusat perlu memperkuat tata kelola dan kelembagaan penyelenggaraan air minum serta meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara utama Sistem Penyediaan Air Minum.

Fraksi PKS berpandangan kebijakan belanja Pemerintah yang memberikan perhatian khusus dalam pembangunan IKN berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia lainnya. Fraksi PKS khawatir tujuan pemerataan infrastruktur untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah tidak akan tercapai. Fraksi PKS mengingatkan bahwa amanat penyediaan infrastruktur tidak hanya ada dalam UU IKN saja, namun juga dalam banyak UU lainnya. Sebagai contoh UU No 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan memberikan amanat agar Pemerintah Pusat mengambillalih urusan pelaksanaan pembangunan jalan di daerah, apabila Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan jalan. Hal ini dibutuhkan karena saat ini tingkat kemantapan jalan di daerah prosentasenya masih jauh lebih kecil daripada tingkat kemantapan Jalan nasional. Dimana kemantapan jalan nasional telah mencapai angka sekitar 91 persen, sedangkan tingkat kemantapan jalan

Provinsi hanya sekitar 70 persen dan kemandapan jalan Kabupaten berada dikisaran angka 57 persen saja. Padahal dengan anggaran yang ada saat ini pada TA 2022 diperkirakan terjadi *backlog* atau daftar pekerjaan yang tertunda bidang preservasi jalan mencapai Rp 14,9 triliun. Sehingga diprediksi kemandapan jalan nasional mengalami penurunan 1,09 persen menjadi 90,71 persen pada akhir 2022. Oleh sebab itu Fraksi PKS mendesak Pemerintah untuk tidak hanya memperhatikan panjang jalan yang telah dibuat, namun juga kualitas jalan secara keseluruhan.

53. Fraksi PKS mendesak pemerintah memperbaiki sektor logistik, sebab mahal biaya logistik dapat mempengaruhi ongkos produksi yang kemudian akan menentukan harga jual produk akhir dan dapat memengaruhi pasar ekspor dan impor. Sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan Indonesia kurang bisa bersaing dalam penanaman modal asing di dalam negeri. Berdasarkan data yang ada, biaya logistik Indonesia pada kuartal pertama tahun 2021 mencapai 23,5 persen dari PDB dengan rincian yaitu 8,9 persen biaya inventori, 8,5 persen transportasi darat, 2,8 persen laut, 2,7 persen administrasi, dan 0,8 persen biaya lainnya. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain yakni: Singapura (8 persen), Amerika Serikat (8 persen), Uni Eropa (9 persen), Jepang (9 persen), Korea Selatan (9 persen), India (13 persen), Malaysia (13 persen), dan China (15 persen). Selain itu peringkat Logistics Performance Index (LPI) Indonesia berada pada ranking 46 dari 160 negara di tahun 2018. Posisi Indonesia masih jauh di bawah Singapura yang berada di ranking 7, di bawah Vietnam yang berada di ranking 39 dan Thailand di ranking 41. LPI Indonesia mendapatkan skor rata-rata 3,15 dari skor tertinggi 5. Dimana terdapat dua capaian indikator, yaitu customs (kepabeanan) mendapat skor 2,67 dan infrastructure (infrastruktur) 2,89 yang masih mencatat skor di bawah 3 pada LPI. Oleh sebab itu Fraksi PKS berpandangan perbaikan di sektor logistik tidak bisa hanya dilakukan melalui pembangunan infrastruktur saja, tetapi perlu juga disertai dengan perbaikan ekosistem logistik melalui penyederhanaan birokrasi, integrasi sistem yang disertai dengan pemberantasan korupsi serta pungutan liar

di sektor tersebut. Dengan ekosistem logistik yang efisien, diharapkan biaya logistik nasional dapat menurun.

54. Fraksi PKS mencatat penetapan DAK fisik untuk ketahanan pangan bidang pertanian sebesar Rp2,30 triliun dan DAK bidang kelautan dan perikanan sebesar Rp1,23 triliun). Termasuk juga DAK non fisik untuk ketahanan pangan dan pertanian sebesar Rp300,06 miliar. Fraksi PKS menilai penetapan DAK fisik dan non fisik ini harus diarahkan untuk mendukung program-program pemerintah yang mampu menghasilkan infrastruktur bidang perikanan dan kelautan di daerah khususnya pada daerah yang menjadi sentra utama bidang kelautan dan perikanan, pertanian dan juga produk hewani.
55. Fraksi PKS mengkritisi masih masuknya kegiatan food estate dalam kegiatan tematik DAK sebelum proses evaluasi menyeluruh terhadap progress food estate yang sudah dibangun diberbagai daerah. Fraksi PKS menilai dari hasil monitoring dan evaluasi internal baik dikomisi maupun di fraksi, program food estate berpotensi untuk gagal. Fraksi PKS menyarankan pemerintah untuk melakukan audit menyeluruh kegiatan food estate sebelum dijadikan program ketahanan pangan. Mengingat program ini banyak dikritisi serta sangat berpotensi mengalami kegagalan. Fraksi PKS menilai program mengenai Kawasan Sentra Produksi Pangan adalah program yang bagus seperti halnya food estate, namun jika tidak direncanakan dengan baik maka akan berpotensi gagal seperti kegiatan pendahulunya.
56. Fraksi PKS mendorong program ketahanan pangan menjadi program prioritas pemerintah yang mana hal ini sejalan dengan kebijakan anggaran pemenuhan anggaran bidang-bidang pembangunan yang bersifat prioritas (antara lain pendidikan, kesehatan, perlintsos, infrastruktur, dan ketahanan pangan). Namun, Fraksi PKS juga meminta pemerintah tidak hanya fokus pada sektor pertanian melalui dana ketahanan pangan sebesar 300 M yang ditujukan kepada 5.782 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), 933 Pusat Kesehatan Hewan, dan 1.255 kelompok masyarakat yang melaksanakan Program Pekarangan Pangan Lestari

(P2L). Fraksi PKS menyarankan juga untuk fokus kepada ketahanan pangan perikanan khususnya bagi penyuluh perikanan yang jumlahnya sangat jauh dibawah standar. Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk secara efisien menggunakan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp95 triliun (perencanaan 2023) untuk riset dan pengembangan ketahanan pangan affirmative, pengembangan sistem logistik dan hilirisasi komoditas strategis dan ekonomis penting.

57. Fraksi PKS juga mendesak pemerintah untuk memperhatikan penurunan indeks keamanan pangan yang menyangkut keterjangkauan, ketersediaan, kualitas dan keamanan pangan serta kualitas sumberdaya alam dan resiliensi. Menurut lembaga Global Food security Indeks (The economist) posisi indonesia tahun 2021 melorot 12 peringkat dari tahun 2020. Ada persoalan serius mengenai keamanan pangan di Indonesia. Fraksi PKS mengkritisi klaim penambahan Kawasan padi/fasilitas penerapan budidaya padi seluas 1.215.853 Ha pada tahun 2018 menjadi seluas 3.443.625 Ha (kumulatif) pada tahun 2022, namun faktanya produksi gabah kering giling dalam 3 tahun terakhir ini fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan. Menurut data BPS tahun 2020 produksi GKG sebesar 54.649.202 ton dan tahun 2021 sebesar 54.415.294 ton atau berkurang sebesar 233.908 ton. Fraksi PKS juga menyoroti klaim pemerintah terkait dengan peningkatan luas Kawasan jagung/fasilitas penerapan budidaya jagung seluas 2.830.650 Ha pada tahun 2018 menjadi seluas 3.556.672 Ha (kumulatif) pada tahun 2022; Kawasan kedelai/fasilitas penerapan budidaya kedelai seluas 546.586 Ha pada tahun 2018 menjadi seluas 898.971 Ha (kumulatif) pada tahun 2022; namun penambahan tersebut tidak mengurangi ketergantungan indonesia terhadap impor kedua komoditas tersebut.

58. Fraksi PKS mendorong dan mendesak pemerintah untuk mengkaji dan mengevaluasi pola subsidi pupuk saat ini agar pola subsidi pupuk yang dilakukan saat ini tidak cenderung hanya menguntungkan distributor pupuk saja. Fraksi PKS juga mengkritisi program pemerintah dibidang pertanian yang hanya

mengejar sisi produksi namun belum begitu fokus terhadap kesejahteraan petani. jika memperhatikan data BPS mengenai NTP (Nilai Tukar Petani) pada akhir tahun 2021 berada pada angka 104,64 mengalami kenaikan signifikan sejak tahun 2019 (100,5) dan tahun 2020 (101,68). Namun jika kita bedah angka NTP 104,64 itu yang menjadi kontributor terbesar adalah NTP Perkebunan sebesar 120,97, sedangkan NTP Pangan (beras) menjadi kontributor terendah yaitu 98,21.

59. Fraksi PKS berpandangan bahwa sektor peradilan, khususnya Mahkamah Agung yang mendapatkan Pagu Anggaran yang direncanakan sebesar Rp12.246,2 miliar, telah luput memprioritaskan hal yang esensial, yaitu perekrutan hakim baru yang berkualitas disertai dengan peningkatan kesejahteraaannya, sehingga perkara yang menumpuk dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu, Fraksi PKS mengapresiasi adanya program-program terobosan dalam sektor peradilan seperti penyelesaian perkara melalui sidang di luar gedung pengadilan, peningkatan fungsi Sistem Pengadilan Pidana Terpadu – TI di pengadilan, bimbingan teknis tentang perempuan yang berhadapan dengan hukum serta pengembangan aplikasi e-court upaya hukum kasasi dan PK. Fraksi PKS juga mendorong untuk peningkatan program layanan pos bantuan hukum yang merupakan akses keadilan bagi rakyat kecil.
60. Fraksi PKS mencatat bahwa pada RAPBN TA 2023, anggaran Kepolisian Negara RI direncanakan sebesar Rp107,7 triliun. Fraksi PKS berpandangan bahwa Kepolisian Negara RI harus fokus terhadap pembenahan internal POLRI, terlebih dengan adanya kasus viral yang dapat menggerus kepercayaan publik terhadap POLRI belakangan ini. Fraksi PKS mendorong Pemerintah dalam hal ini adalah POLRI dalam usaha usaha penegakan hukum yang adil dan transparan dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik serta mendukung terkait dengan peningkatan profesionalisme SDM POLRI.
61. Fraksi PKS mendorong adanya inovasi dan peningkatan Layanan Berbasis Elektronik (LBE) dalam reforma agraria, namun perlu diperhatikan apakah

ketersediaan infrastruktur yang memadai di seluruh wilayah baik dari segi sumberdaya manusia maupun sarana dan prasarana wilayah tersebut. Jangan sampai sudah mencanangkan LBE namun wilayah dan SDM nya tidak mendukung. Oleh karena itu Fraksi PKS meminta transparansi dan mendesak keamanan dari penggunaan LBE ini agar database kepemilikan tanah yang tersimpan tidak disalahgunakan pihak-pihak tidak bertanggungjawab, Seiring dengan perkembangan reforma agraria, Fraksi PKS mendorong Pemerintah agar memperkuat peran, kewenangan dan alokasi anggaran untuk SATGAS Mafia Tanah (sebaiknya tidak hanya dari unsur BPN dan Kepolisian, tapi juga libatkan unsur KPK, PPATK, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung serta masyarakat sipil. Kemudian Pemerintah juga perlu dapat memfasilitasi atau mempercepat proses peradilan.

62. Fraksi PKS memandang bahwa alokasi anggaran pertahanan harus berdampak langsung secara positif terutama terhadap kesejahteraan prajurit, industri pertahanan dan alutsista dalam negeri. Fraksi PKS juga mendorong agar kesejahteraan para prajurit TNI juga dapat ditingkatkan terutama yang menjalankan pengabdian di daerah terpencil dan perbatasan-perbatasan negara. Anggaran Belanja fungsi pertahanan harus berkelanjutan agar jelas capaian output dan outcome yang dicapai pada setiap tahun. Alokasi anggaran pertahanan harus berdampak langsung terutama terhadap kesejahteraan prajurit, industri pertahanan dan alutsista dalam negeri. Fraksi PKS berpendapat bahwa alokasi anggaran pertahanan juga perlu memperhatikan anggaran riset industri pertahanan agar dapat mendukung kemandirian Indonesia dalam penyediaan dan pengembangan alutsista pertahanan. Fraksi PKS juga mengingatkan bahwa anggaran belanja fungsi pertahanan ini wajib dijaga tata kelolanya dan dipastikan tidak mengalami korupsi karena merupakan belanja yang vital bagi kelangsungan negara. Fraksi PKS mencatat Pagu Indikatif Kemhan dalam RAPBN 2023 sebesar Rp123.441 miliar turun 8,3% dibandingkan APBN tahun 2022 yang sebesar Rp134.673,4 miliar. Anggaran tersebut

dialokasikan kepada 7 (tujuh) program terbesar alokasi pada dukungan manajemen yang mengalami peningkatan anggaran dibanding APBN tahun 2022 sebelumnya yakni sebesar 10,96 persen menjadi sebesar Rp79 triliun disusul program modernisasi alutsista, non alutsista, dan sarana prasarana pertahanan sebesar Rp30,6 triliun atau 24,8 persen dari total anggaran. Sementara Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan merupakan program dengan alokasi anggaran hanya Rp55 miliar menurun secara signifikan sebesar 83,3 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian, program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit sebesar Rp9,5 triliun. Fraksi PKS berpandangan bahwa Program penguatan cadangan pangan nasional sebaiknya menempatkan KEMHAN sebagai Koordinator dan Pengarah kemudian pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian terkait seperti KEMENTAN, KLH, dan KEMENHUT.

63. Fraksi PKS berpandangan agar daya beli rakyat menguat dan meringankan beban hidup rakyat, maka Pemerintah perlu menetapkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Roda Dua adalah yang dikecualikan kewajiban pembayarannya sebagai Pajak Provinsi. Fraksi PKS berpandangan hal ini perlu untuk dilakukan agar masyarakat miskin dan rentan yang menggunakan kendaraan bermotor roda dua sebagai bagian dari alat mata pencaharian hidup tidak terbebani setiap tahun untuk mengurus dan membayar Pajak Kendaraan Bermotor roda dua, dan membayar kewajiban Bea Balik Nama Kendaraan bermotor roda dua. Hal ini perlu dilakukan sebagai insentif kepada masyarakat kecil dan berpenghasilan rendah yang pada umumnya menjadikan kendaraan bermotor roda dua sebagai bagian dari alat untuk mencari penghasilan hidup. Fraksi PKS berpandangan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Roda Dua, dan pungutan biaya STNK Motor tersebut dapat ditutup dengan bagi hasil pajak dari pemerintah Pusat terutama dari Pajak Pertambahan Nilai nantinya.

64. Kemudian, Fraksi PKS berpandangan agar Surat Izin Mengemudi (SIM) dapat berlaku seumur hidup. Pemberlakuan ini dilakukan agar masyarakat tidak terbebani setiap lima tahun sekali melakukan perpanjangan masa berlaku SIM, baik beban ekonomi maupun beban waktu dan tenaga. Hal ini juga sebagai insentif masyarakat kecil yang sebagian besar menjadikan motor sebagai bagian dari alat transportasi untuk mencari penghasilan. Pembaruan SIM setiap lima tahun sekali dapat merepotkan karena harus mengorbankan waktu produktif atau waktu mencari penghasilan untuk mengurus administrasi perpanjangan masa berlaku SIM. Dengan dihilangkannya kewajiban ini maka dapat mempunyai efek positif kepada penghematan waktu produktif masyarakat. Selain itu, dengan hanya membayar sekali saja pengurusan untuk mendapatkan SIM maka pembebasan ini dapat memberikan keringanan masyarakat. Namun, pemberlakuan ini dapat dievaluasi jika selama penggunaan SIM terjadi pelanggaran hukum lalu lintas berat atau yang disamakan dengannya sehingga SIM dapat dicabut. Bagi pengemudi yang SIM-nya dicabut dapat mengajukan kembali permohonan SIM baru dan menempuh ujian untuk mendapatkan SIM sebagaimana peraturan yang berlaku.
65. Selanjutnya, Fraksi PKS berpandangan agar Pemerintah membebaskan kewajiban pembayaran pajak bagi Wajib Pajak pribadi berpenghasilan sampai dengan Rp8 juta per bulan. Fraksi PKS berpandangan hal ini perlu dilakukan dengan tujuan untuk mengatasi rendahnya daya beli dan mengurangi beban kesulitan hidup yang mendera masyarakat kecil dan rentan. Selain itu ada beberapa pertimbangan yang Fraksi PKS berikan di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi stagnan dan pelemahan daya beli masyarakat, kenaikan PTKP belum cukup mendongkrak daya beli masyarakat, besarnya jumlah kaum muda berpenghasilan menengah ke bawah yang rentan jatuh ke jurang kemiskinan, dibutuhkan stimulus fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Program ini tidak akan membebani APBN secara signifikan, mengurangi beban perusahaan dan mendorong penciptaan lapangan kerja.

Fraksi PKS berpandangan bahwa meskipun kebijakan ini akan berdampak pada penurunan penerimaan PPh, namun di sisi lain ini merupakan potensi daya beli yang dapat meningkatkan kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, potensi kehilangan penerimaan PPh tersebut sangat mungkin dikompensasi oleh peningkatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas konsumsi masyarakat yang menguat serta transaksi ekonomi yang meningkat. Selain itu, kehilangan potensi penerimaan PPh tersebut dapat pula ditutup dengan program-program ekstensifikasi dan intensifikasi pengenaan pajak yang perlu terus dimaksimalkan oleh Direktorat Jenderal Pajak tanpa memberatkan masyarakat.

66. Fraksi PKS mendesak agar Pemerintah dapat menekan jumlah utang negara. Jumlah utang yang meningkat mengakibatkan pembayaran bunga utang yang juga terus meningkat. Dalam Anggaran Pembayaran Bunga Utang RAPBN 2023 meningkat menjadi Rp441,4 triliun yang sebelumnya outlook APBN 2022 sebesar Rp403,9 triliun. Fraksi PKS mencatat terkait dengan meningkatnya pembayaran bunga utang dalam negeri dalam RAPBN 2023 sebesar Rp426,8 triliun, berdasarkan outlook 2022 Rp391,7 triliun dan Pembayaran bunga Utang Luar Negeri Rp14,6 triliun RAPBN 2023 dan 12,2 triliun outlook 2022. Peningkatan jumlah Utang dan Bunga Utang mengakibatkan celah fiskal APBN semakin menyempit, setelah memenuhi mandatory spending yang diamanatkan oleh konstitusi. Fraksi PKS mendorong Pemerintah untuk dapat menjalankan manajemen Defisit yang baik sehingga APBN khususnya utang negara dan pembayaran bunga utang dapat optimal dan *value of money*.

Transfer ke Daerah

67. Fraksi PKS memandang penting untuk mengingatkan bahwa implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) harus sejalan dengan semangat untuk memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui perbaikan kualitas output dan outcome layanan publik serta pemerataan kesejahteraan rakyat seluruh

daerah di Indonesia tanpa kecuali. Fraksi PKS juga menganggap penting untuk mengingatkan komitmen terhadap arah kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2023 secara umum yakni: (1) meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah; (2) memperkuat kualitas pengelolaan TKD melalui implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) secara terarah, terukur, akuntabel dan transparan untuk percepatan transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; (3) memperkuat penggunaan TKD untuk mendukung sektor-sektor prioritas; (4) meningkatkan kemampuan perpajakan daerah (local taxing power) dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat; (5) mengoptimalkan pemanfaatan belanja daerah untuk penguatan akses dan kualitas layanan publik; dan (6) mendorong pemanfaatan instrumen pembiayaan untuk mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal dan kebutuhan percepatan pembangunan.

68. Anggaran TKD mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dan pada RAPBN tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp811,7 triliun, hanya mengalami kenaikan sebesar Rp6,9 triliun dibandingkan pagu anggaran TKD tahun 2022 dimana terjadi penambahan Rp35,2 triliun atau 2,4 persen, dari Rp769,6 triliun dalam APBN tahun anggaran 2022 menjadi Rp804,8 triliun berdasarkan Perpres Nomor 98 Tahun 2022. Tahun 2019, anggaran TKD sebesar Rp826,8 triliun yang kemudian naik menjadi Rp856,9 triliun di tahun 2020 meskipun pada akhirnya terjadi pemangkasan berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 menjadi sebesar Rp763,93 triliun. Kemudian di tahun 2021 kembali naik menjadi sebesar Rp795,5 triliun. Fraksi PKS mengingatkan bahwa anggaran TKD harus sesuai dan sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di daerah melalui dukungan pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan kegiatan pembangunan di daerah.

69. Fraksi PKS memandang bahwa redesign dan perubahan pengelolaan anggaran Transfer ke Daerah harus selaras dengan semangat mengurangi ketimpangan di daerah serta mendorong perbaikan kualitas belanja yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan guna mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Rincian TKD pada RAPBN tahun anggaran 2023 terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp136,3 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp396,0 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp182,9 triliun yang terdiri dari DAK Fisik Rp50,5 triliun, DAK Nonfisik Rp130,3 triliun, dan Hibah ke Daerah Rp2,1 triliun. Dana Otonomi Khusus sebesar Rp17,2 triliun terdiri dari Dana Otsus Provinsi-provinsi di Wilayah Papua sebesar Rp8,9 triliun, Dana Otsus Provinsi Aceh Rp4,0 triliun, dan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi-provinsi di Wilayah Papua Rp4,4 triliun. Dana Keistimewaan D.I.Yogyakarta Rp1,3 triliun, Dana Desa Rp70,0 triliun, dan Insentif Fiskal Rp8,0 triliun.
70. Fraksi PKS mengingatkan bahwa DBH merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Pada RAPBN tahun anggaran 2023 DBH direncanakan sebesar Rp136,3 triliun. Transparansi dan akuntabilitas Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan keharusan. Berbagai permasalahan yang muncul terkait DBH mulai dari keberatan pemda atas besaran DBH yang dianggap masih kurang mencukupi sampai terlambatnya pencairan DBH juga harus segera diselesaikan. Untuk itu, Fraksi PKS mengingatkan pentingnya mitigasi risiko terkait tata kelola DBH secara komprehensif.
71. Fraksi PKS juga mengingatkan bahwa DAU merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah. DAU nasional dalam RAPBN tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp396,0 triliun, meningkat sebesar Rp18,0 triliun atau 4,8

persen dibandingkan dengan outlook tahun 2022. Penghitungan alokasi DAU pada tahun 2023 dilakukan menggunakan formula Celah Fiskal yang merupakan selisih antara Kebutuhan Fiskal daerah dan Potensi Pendapatan daerah. Selain itu, diperhitungkan juga faktor penyesuaian yang bertujuan untuk memberikan afirmasi alokasi kepada daerah karena perbedaan tingkat kemahalan konstruksi dan/atau karakteristik daerah yang relatif membutuhkan pendanaan lebih dibandingkan daerah lainnya. Alokasi DAU pada tahun 2023 juga tidak lagi bersifat block grant secara keseluruhan, melainkan penggunaannya ditetapkan secara block grant dan specific grant sesuai dengan penilaian target kinerja daerah, dengan menambahkan earmarking untuk pendanaan kelurahan, dan mempertimbangkan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, Fraksi PKS memandang pentingnya penguatan komunikasi dan koordinasi antara pusat dengan daerah sebagai satu bentuk quality control serta pentingnya keakuratan dari instansi penyedia data dalam menghitung Kebutuhan Fiskal dan Potensi Pendapatan daerah yang akan digunakan sebagai data dasar penghitungan alokasi DAU.

72. Fraksi PKS menekankan bahwa alokasi DAK harus memerhatikan dukungan pemenuhan mandatory spending khususnya pendidikan dan kesehatan, ketahanan pangan, tambahan dukungan penguatan untuk Industri Kecil dan Menengah (IKM), sarana dan prasarana fisik/non fisik, komunikasi, serta penggalan/peningkatan potensi daerah. Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas nasional melalui restrukturisasi beberapa bidang DAK Fisik jenis penugasan berbasis tematik juga harus diimbangi dengan penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana utama untuk layanan publik di daerah. Dalam RAPBN tahun anggaran 2023, DAK Fisik direncanakan sebesar Rp50,5 triliun dan DAK Nonfisik direncanakan sebesar Rp130,3 triliun. DAK Nonfisik dianggarkan lebih tinggi sebesar Rp3,4 triliun atau 2,7 persen dibandingkan dengan outlook tahun 2022 karena adanya perluasan sasaran pada beberapa jenis DAK Nonfisik.

73. Fraksi PKS mencatat bahwa Rencana Anggaran DAK Fisik Bidang Pendidikan dari Rp18,34 triliun pada 2022 menjadi Rp15,22 triliun pada tahun 2023. Jika merujuk pada tujuan dari DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah untuk mempercepat penyediaan infrastruktur publik terutama sarana prasarana pendidikan berupa revitalisasi satuan pendidikan dan pembangunan gedung layanan perpustakaan daerah. Sementara itu rata-rata lama sekolah pada tahun 2021 hanya 8,54 tahun atau dengan kata lain, rata-rata penduduk Indonesia berusia 25 tahun ke atas menempuh pendidikan hanya sampai dengan kelas 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Rata-rata lama sekolah ini akan berkaitan dengan tingkat partisipasi sekolah di mana terlihat Angka Partisipasi Murni (APM) SMA hanya sebesar 61,65 pada tahun 2021. Ini menunjukkan bahwa hanya 61,65 persen penduduk berusia 16-18 tahun bersekolah tepat waktu di jenjang SMA/ sederajat. Kondisi geografis Indonesia yang beragam juga menjadi salah satu sebab APM belum maksimal. Daerah dengan tingkat kesulitan geografis yang tinggi cenderung memiliki APM yang rendah. Oleh karena itu, Fraksi PKS berpandangan bahwa peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan pendidikan, terutama di daerah 3T harus menjadi perhatian dan prioritas.

74. Fraksi PKS mencermati DAK nonfisik yang direncanakan sebesar Rp130,3 triliun dimana DAK Non Fisik meliputi BOS, BOP PAUD, dan BOP Pendidikan Kesetaraan, Tunjangan Guru ASND (TPG ASND, Tunjangan Tambahan Penghasilan /Tamsil ASND, dan TKG ASND di Daerah Khusus), serta BOP Museum dan Taman Budaya. Fraksi PKS menilai bahwa pemerintah harus secara konsisten terus mendorong peningkatan kinerja dan kompetensi guru, antara lain dengan pemberian insentif. Namun demikian pemberian pelbagai insentif peningkatan kesejahteraan tersebut belum sepenuhnya disertai dengan peningkatan kompetensi guru yang diukur dengan hasil Uji Kompetensi Guru (UKG). Hasil UKG meskipun menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, akan tetapi capaiannya masih belum cukup optimal yaitu rata-rata nasional hanya 58,5 (skala 100) di tahun 2019. Capaian skor tertinggi (mencapai skor 62,3) ada pada

guru di jenjang SMA, sedangkan capaian skor terendah (dengan skor 54,8) ada pada guru di jenjang SD. Kondisi ini terbilang masih belum optimal untuk mendukung terciptanya sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Fraksi PKS berpandangan bahwa dengan peningkatan anggaran DAK Nonfisik terutama untuk insentif guru diharapkan kompetensi guru juga meningkat sehingga dapat menunjang terlaksananya proses belajar yang berkualitas. Fraksi PKS menyoroti bahwa dari total anggaran DAU yang diperkirakan digunakan untuk pembayaran gaji tenaga pendidik sebesar Rp129,7 triliun sedangkan yang diperkirakan untuk pembayaran non gaji pendidik sebesar Rp44,3 triliun pada tahun 2023 sudah termasuk penjaminan atas biaya gaji Guru PPPK yang selama ini masih menjadi kendala di beberapa daerah.

75. Fraksi PKS melihat Dana Otonomi Khusus sebagai bagian dari TKD yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus harus memiliki grand design yang jelas tentang arah, strategi, indikator dan target yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Sesuai dengan pengaturan terkait persentase alokasi Dana Otsus Provinsi-provinsi di Papua sebesar 2,25 persen dari pagu DAU dan Dana Otsus Provinsi Aceh sebesar 1,0 persen dari DAU maka alokasi Dana Otsus dan DTI dalam RAPBN tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp17,2 triliun atau lebih rendah sebesar Rp3,2 triliun dibandingkan dengan outlook tahun 2022. Fraksi PKS juga memandang pentingnya mitigasi risiko dan evaluasi secara komprehensif baik dari aspek regulasi, kelembagaan serta sumber daya manusia untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pelaksanaan dalam hal kewenangan dan pendanaan, sehingga tujuan dari Dana Otonomi Khusus bisa tercapai.

76. Fraksi PKS memandang bahwa Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dialokasikan untuk mendukung urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai keistimewaan Yogyakarta harus dioptimalkan. Pada RAPBN tahun anggaran 2023, Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta direncanakan sebesar Rp1,3 triliun

atau sama dengan outlook tahun 2022. Fraksi PKS melihat pentingnya keselarasan antara tujuan Dana Keistimewaan dengan pengelolaan dan peruntukannya sehingga penilaian atas output maupun outcomenya menjadi lebih terukur dan objektif.

77. Fraksi PKS Fraksi PKS mengingatkan pentingnya optimalisasi Dana Desa yang bersumber dari APBN dialokasikan dengan mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan, sesuai amanat Pasal 72 ayat (1) huruf b UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebagai bagian dari TKD, Dana Desa diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Berdasarkan UU tersebut keberadaan desa juga dikukuhkan sebagai subyek dalam pembangunan. Untuk itu, Fraksi PKS melihat bahwa setiap desa yang memiliki karakteristik dan potensi berbeda membutuhkan keleluasaan dalam menentukan alokasi dan penggunaan dana, selaras dengan tujuan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan serta menciptakan upaya kemandirian daerah dengan potensi yang dimilikinya.
78. Fraksi PKS juga memandang Dana Desa perlu dinaikkan kembali pada tahun anggaran 2023, setelah sebelumnya menurun dari Rp72 triliun (2021) menjadi Rp68 triliun (2022). Besarnya Dana Desa yang diterima setiap desa di seluruh Indonesia, selain kebermanfaatannya juga masih menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak. Terdapat banyak potensi kesalahan pada pengelolaan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, sampai adanya celah korupsi. Untuk itu, Fraksi PKS mendukung penuh langkah dan upaya penguatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, baik atas tata kelola keuangan, kinerja, maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dana Desa dalam RAPBN tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp70,0 triliun atau meningkat sebesar Rp2,1 triliun atau 3,0 persen dibandingkan outlook tahun 2022.

79. Fraksi PKS memandang Insentif Fiskal yang merupakan perubahan nomenklatur dari Dana Insentif Daerah (DID) mulai tahun anggaran 2023, harus diperkuat dengan peningkatan sosialisasi yang masif ke daerah-daerah terkait kategori, kriteria dan persyaratan untuk mendapatkan insentif dari pemerintah, terutama bagi daerah-daerah yang belum pernah menerima. Fraksi PKS memandang peningkatan jumlah besaran Insentif Fiskal dari Rp6,9 triliun pada outlook 2022 menjadi Rp8,0 triliun pada RAPBN 2023 masih cukup rendah dibandingkan dengan insentif yang diberikan dari tahun 2018 sampai 2021. Insentif Fiskal merupakan hal yang menarik bagi daerah untuk berkompetisi secara positif sehingga perlu adanya peningkatan edukasi yang memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh daerah terutama yang belum mendapatkan.
80. Fraksi PKS mendesak adanya penguatan mitigasi risiko atas berbagai permasalahan otonomi dan desentralisasi fiskal yang selama ini terjadi, mulai dari ketimpangan keuangan vertikal maupun horizontal, serapan belanja di daerah, permasalahan dana pemerintah daerah yang mengendap di bank, quality spending pelaksanaan anggaran di daerah, masih tingginya gap pelayanan publik antara daerah maju dan daerah tertinggal, dan masih besarnya ketergantungan pemerintah daerah kepada dana transfer karena belum optimalnya pendapatan asli daerah. Langkah ini sebagai satu bentuk implementasi komitmen pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan tata kelola keuangan, pemerataan pelayanan dasar, termasuk kesehatan, pendidikan serta ketersediaan infrastruktur layanan publik lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
81. Fraksi PKS mendesak pemerintah agar memastikan bahwa dana TKD ditambahkan atau sudah memperhitungkan untuk membayar gaji dan tunjangan ASN baik PNS maupun P3K Guru dan Tenaga Kependidikan (Guru ASN, Honorer dan Swasta) agar penyelenggaraan sektor pendidikan di negeri ini terjamin keberlangsungannya. Mengingat guru adalah garda terdepan dalam usaha-usaha mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Fraksi PKS memandang bahwa profesi

guru dan profesi lainnya adalah profesi yang mulia. Sebagai ilustrasi, jika profesi dokter menjamin kelangsungan hidup manusia, maka profesi guru dapat menjamin kelangsungan hidup suatu bangsa. Kemudian, Fraksi PKS mendorong dan mendesak agar Pemerintah tidak mengenakan pungutan atau pajak dalam bentuk apapun terhadap honor relawan-relawan di desa seperti kader posyandu, relawan jumantik, relawan Keluarga Berencana, Kader PLKB, Kader Pendamping Petani dan Nelayan, dan seterusnya dengan mekanisme Pajak DTP. Termasuk juga dengan pengadaan-pengadaan di desa yang bersifat kebutuhan primer masyarakat desa dengan jumlah tidak besar dan bersumber dari Dana Desa.

Defisit dan Pembiayaan

82. Fraksi PKS menyoroti pemerintah dalam penetapan defisit APBN 2023 sebesar Rp598,15 triliun atau 2,85 persen tidak sejalan dengan pesimisme yang sebenarnya sangat nyata. Pada 2023 batas atas defisit anggaran mulai kembali sesuai ketetapan UU Nomor 17 tahun 2003 yang mengatur batas defisit APBN sebesar maksimal 3 persen dari PDB. Oleh karena itu, fraksi PKS mengamati penetapan defisit di atas tidak benar-benar mencerminkan proyeksi kondisi keuangan negara 2023 nanti. Pemerintah seolah hanya ingin mendapatkan pengesahan UU APBN 2023, namun di sisi lain menyiapkan amunisi rancangan norma peraturan yang dapat membenarkan ketika defisit terealisasi melebihi ketentuan UU yang berlaku.

Norma peraturan yang dimaksud adalah pasal 46 (1) yang berbunyi "Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan langkah antisipasi dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat." Ayat berikutnya menjelaskan lebih rinci yang sifatnya dapat mendesak posisi DPR dalam menjalankan fungsi anggaran. Disebutkan bahwa pasal 46 (2) berbunyi "Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keputusan yang tertuang di dalam kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah, yang diberikan dalam waktu tidak lebih dari 2x24 (dua kali

dua puluh empat) jam setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat.”

83. Fraksi PKS memperingatkan pemerintah bahwa fleksibilitas aturan hanya akan menurunkan komitmen Pemerintah untuk mencapai defisit dibawah 3 persen dari PDB. Kedaruratan yang dimunculkan acap kali memiliki definisi yang terlalu subjektif, sehingga tidak dapat dibuktikan secara akademis. Apabila aturan defisit kembali dilunakkan, akan berpengaruh langsung terhadap perilaku penambahan utang yang dinilai sudah terlalu besar. Oleh karena itu, fraksi PKS menilai pasal ‘payung’ tersebut tidak diperlukan.
84. Fraksi PKS kembali menyoroti pembiayaan utang yang tinggi sebesar Rp696,32 triliun. Sebagai informasi bahwa anggaran pembayaran bunga utang tahun 2023 sebesar Rp441,4 triliun atau mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebesar 9,3 persen dari outlook tahun 2022. Artinya bahwa sebagian besar pembiayaan utang dialamatkan untuk pembayaran bunga utang (belum termasuk pembayaran cicilan pokok utang). Dapat disimpulkan bahwa program peningkatan kualitas belanja (*spending better*) tidak dapat direalisasikan, karena faktanya penambahan utang tersebut penggunaannya didominasi untuk hal yang tidak produktif.
85. Fraksi PKS memberi peringatan terhadap pemerintah terkait akumulasi utang saat ini yang sudah mencapai Rp7.163 triliun yang setara dengan 37,91 persen terhadap PDB. Pada 2014 jumlah akumulasi utang pemerintah sebesar Rp 2.608 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 24,7 persen. Dengan demikian, pemerintah hanya dalam rentang 9 tahun telah menambahkan lebih dari 200 persen dari jumlah utang sebelumnya. Peningkatan utang akan mempengaruhi peningkatan rasio pembayaran utang terhadap pendapatan atau *debt to service ratio* (DSR) dan juga berisiko terhadap peningkatan biaya bunga utang yang sudah sangat membebani APBN. Di mana saat ini utang pemerintah telah melampaui batas yang direkomendasikan oleh Dana Moneter Internasional (IMF)

dan International Debt Relief (IDR), rekomendasi IMF 25 persen-35 persen terhadap PDB.

86. Fraksi PKS mendesak pemerintah segera mengeluarkan keseimbangan primer dari zona negatif dalam jangka pendek. Postur RAPBN 2023 menargetkan keseimbangan primer pada negatif Rp156,75 triliun atau -0,7 persen terhadap PDB. Hal ini berarti kesinambungan fiskal masih menghadapi tantangan dalam APBN 2023, di mana jumlah pendapatan negara tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan belanja negara serta pembayaran beban bunga utang secara otomatis menggunakan sumber dari penerbitan utang baru yang akan menambah beban anggaran di masa mendatang. Fraksi PKS menilai seharusnya keseimbangan primer pada 2023 sudah dapat ditargetkan positif, sejalan dengan proses pemulihan ekonomi yang berjalan, fasilitas relaksasi defisit selama tiga tahun dan telah kembalinya batas defisit pada 3 persen dari PDB. Apabila keseimbangan primer dibiarkan defisit dalam waktu yang lama, artinya alokasi anggaran tiap tahunnya makin besar digunakan untuk belanja yang tidak produktif, yaitu membayar bunga utang yang pokoknya semakin bertambah.

Keseimbangan primer erat kaitannya dengan kesinambungan fiskal. Apabila kedua hal tersebut terjadi masalah, pemerintah semestinya segera mengevaluasi kebijakan fiskal yang telah dikeluarkan. Efektivitas kebijakan dapat dilihat dengan jaminan adanya kesinambungan fiskal, di mana semestinya utang dapat terkendali dan kemampuan membayar tanpa penerbitan utang baru dapat dilaksanakan demi kelancaran fungsi ekonomi. Pemerintah tidak boleh selalu berlindung dari adanya gejolak ekonomi global yang menyebabkan ketidakpastian, sebaliknya harus mampu segera menyesuaikan kebijakan yang efektif untuk menghadapi segala pengaruh yang datang dari luar. Hal ini karena kesinambungan fiskal merupakan faktor dominan dari keadilan antargenerasi.

87. Fraksi PKS memandang pembiayaan investasi yang dianggarkan dengan dominasi klaster infrastruktur yang hampir menguasai setengah dari total

anggaran pembiayaan investasi, pada saat ini merupakan hal yang tidak tepat. Apalagi jika dilihat anggaran tersebut digunakan untuk penambahan PMN pada BUMN yang tergolong kuat. Fraksi PKS menyoroti adanya tambahan PMN kepada Utama Karya dan PLN disebabkan adanya kewajiban kontijensi dimana pemerintah melakukan penjaminan atas beban dari BUMN tersebut di masa yang akan datang. Kewajiban penjaminan harus dievaluasi ulang karena besaran PMN juga dinilai sangat besar yaitu masing-masing Rp 28 triliun dan Rp10 triliun.

Menilik APBN 2022, dimana terdapat PMN akibat pemerintah turut campur dalam proyek KCJB yang sedari awal berkomitmen tidak akan membebani APBN. Pada akhirnya kerugian proyek harus ditanggung oleh negara, dan kembali rakyat harus ikut tanggung renteng atas proyek yang tidak direncanakan dengan baik. Saat ini, di mana kebutuhan keuangan seharusnya dioptimalkan untuk pemulihan ekonomi, ironinya Pemerintah justru sibuk melakukan penyelamatan BUMN yang bermasalah karena korupsi, *moral hazard*, buruknya *corporate governance* dan manajemen internal. Dana APBN semestinya diprioritaskan untuk menjadi daya dorong konsumsi masyarakat yang sedang terancam akibat inflasi dan pemangkasan beberapa subsidi.

88. Fraksi PKS memperingatkan Pemerintah agar mampu mengoptimalkan anggaran secara produktif, sehingga meminimalisir timbulnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada akhir tahun 2023. Pemerintah semestinya dapat memitigasi risiko timbulnya SiLPA pada setiap tahun anggaran. Sebagai catatan, terjadinya tren kenaikan SiLPA dari tahun 2014 sampai 2019. Kemudian jumlah SiLPA diperparah pada masa pandemi dimana pada 2020 mencapai Rp388,12 triliun dan 2021 tercatat sebesar Rp337,78 triliun. Oleh karena itu, Fraksi PKS mendesak Pemerintah untuk melakukan perbaikan perencanaan keuangan dan program serta pengelolaan utang yang lebih bersifat produktif. Diketahui bahwa SiLPA Indonesia membawa serta beban anggaran APBN berupa pembayaran bunga yang jumlahnya setiap periode meningkat. Artinya bahwa SiLPA yang

terakumulasi dalam SAL jangan sampai terus menjadi dana segar anggaran yang sebenarnya muncul dengan biaya yang tidak murah.

Hadirin yang Kami Muliakan,

Demikian pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI terkait Keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya agar dapat menjadi perhatian dan dapat ditindaklanjuti dalam pembahasan selanjutnya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wallahul Muwafiq ila Aqwamith Thoriq, Billahi Taufiq wal Hidayah,
Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 25 Muharram 1444 H
23 Agustus 2022 M

PIMPINAN
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua,

Sekretaris,



DR. H. Jazuli Juwaini, MA.
A-449

Hj. Ledia Hanifa, A. S.Si. M.Psi. T.
A-427